TANTANGAN HUKUM DAN ASPIRASI DEMOKRATIS: PERSPEKTIF ATAS PERJUANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MUNCULNYA GERAKAN MAHASISWA PRO-DEMOKRASI THAILAND (2020-2021)

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

YULIA LUTHFI NABILLAH

(20323027)

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

TANTANGAN HUKUM DAN ASPIRASI DEMOKRATIS: PERSPEKTIF ATAS PERJUANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MUNCULNYA GERAKAN MAHASISWA PRO-DEMOKRASI THAILAND (2020-2021)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

YULIA LUTHFI NABILLAH

(20323027)

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TANTANGAN HUKUM DAN ASPIRASI DEMOKRATIS: PERSPEKTIF ATAS PERJUANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MUNCULNYA GERAKAN MAHASISWA PRO-DEMOKRASI THAILAND (2020-2021)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh

derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

10 Juli 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	
2. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.	
3. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.	

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yulia Luthfi Nabillah

No. Mahasiswa : 20323027

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : TANTANGAN HUKUM DAN ASPIRASI DEMOKRATIS: PERSPEKTIF ATAS PERJUANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MUNCULNYA GERAKAN MAHASISWA PRO-DEMOKRASI THAILAND (2020-2021).

Melalui surat ini, saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.

2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap untuk menerima sanksi sebagaimana aturan yang telah berlaku di Universitas Islam Indonesia.

3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 24 Juni 2024



Yulia Luthfi Nabillah

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme. Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 24 Juni 2024



Yulia Luthfi Nabillah

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....**i**
HALAMAN PENGESAHAN.....**ii**
HALAMAN PERNYATAAN.....**iii**
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....**iv**
DAFTAR ISI.....**v**
DAFTAR SINGKATAN.....**vi**
ABSTRAK.....**vii**
ABSTRACT.....**vii**
BAB 1 PENDAHULUAN.....**1**
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah.....6
1.3 Tujuan Penelitian.....6
1.4 Cakupan Penelitian.....6
1.5 Tinjauan Pustaka.....7
1.6 Kerangka Pemikiran.....10
1.7 Argumen Sementara.....14
1.8 Metode Penelitian.....14
1.8.1 Jenis Penelitian.....14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....15
1.8.4 Proses Penelitian.....16
1.9 Sistematika Pembahasan.....16
BAB 2 DINAMIKA KONFLIK DAN IDENTITAS KULTURAL DALAM GERAKAN MAHASISWA PRO-DEMOKRASI DI THAILAND.....**17**
2.1. Gerakan Sosial sebagai Ekspresi Konflik.....17
2.2 Isu-Isu Budaya dalam Gerakan Sosial.....24
BAB 3 ANALISIS EMPIRIS GERAKAN MAHASISWA PRO-DEMOKRASI DI THAILAND.....**28**
3.1 Latar Belakang Gerakan Mahasiswa Pro-Demokrasi di Thailand sebagai *Collective Action*.....28
3.2 Tantangan dan Peluang dalam Mobilisasi Sumber Daya.....37
BAB 4 PENUTUP.....**49**
4.1 Kesimpulan.....49
4.2 Rekomendasi.....52
DAFTAR PUSTAKA.....**53**

DAFTAR SINGKATAN

1. *CRES : Centre for the Resolution of the Emergency Situation*
2. *NCPO : National Council for Peace and Order*
3. *NLA : National Legislative Assembly*
4. *FFP : Future Forward Party*
5. *UFTD : United Front of Thammasat and Demonstration Front*

ABSTRAK

Tulisan ini berfokus pada gerakan mahasiswa Thailand pada periode 2020-2021 yang muncul sebagai manifestasi dinamika kompleks dalam tipologi dan analisis mengenai persoalan mahasiswa pro-demokrasi terhadap politik di Thailand. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah menjelaskan faktor pendorong terjadinya gerakan mahasiswa pada tahun 2020-2021 dalam upaya pro-demokrasi terhadap politik di Thailand. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep kerangka pemikiran teori gerakan sosial dan untuk lebih mendalami definisi teori gerakan sosial, penelitian ini merujuk pada sumber dari Buku "*Social Movements: An Introduction*" (1999, edisi kedua 2006) yang ditulis oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani yang berisi pemahaman mendalam mengenai sifat aksi kelompok dan transformasi masyarakat dari beberapa aspek. Dengan demikian, dalam kasus gerakan mahasiswa Thailand akan dipandang sebagai interaksi yang intens antara individu dengan lingkungan sosialnya untuk merepresentasikan bentuk dari semangat bersama yang mendorong kerja sama, solidaritas, dan tindakan kolektif.

Kata kunci : Mahasiswa, Monarki, Junta militer, Gerakan sosial, Aksi kolektif.

ABSTRACT

This paper focuses on the Thai student movement in the 2020-2021 period that emerged as a manifestation of complex dynamics in typology and analyzes the issue of pro-democracy students towards politics in Thailand. Thus, the purpose of the research is to explain the driving factors of the student movement in 2020-2021 in a pro-democracy effort towards politics in Thailand. In this research, the author will use the conceptual framework of social movement theory and to further explore the definition of social movement theory, this research refers to sources from the book "Social Movements: An Introduction" by Donatella Della Porta and Mario Diani which contains an in-depth understanding of the nature of group action and societal transformation from several aspects. Thus, in the case of the Thai student movement, it will be viewed as an intense interaction between individuals and their social environment to represent a form of shared spirit that encourages cooperation, solidarity, and collective action.

Keywords: Students, Monarchy, Military junta, Social movement, Collective action.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Thailand merupakan salah satu negara dengan bentuk pemerintahan menganut sistem kerajaan yang berkonstitusi. Yaitu merupakan jenis konstitusi pemerintahan monarki konstitusional diterapkan sebagaimana raja akan memimpin negara dan Perdana Menteri memimpin pemerintahan. Sebenarnya pemimpin negara yang pada dasarnya tidak dipilih oleh rakyat memiliki sedikit legitimasi untuk pemerintahan yang demokratis, tetapi kepercayaan dari pada masyarakat Thailand yang menjunjung tinggi raja tentunya menjadi komponen yang penting bagi sebuah kehormatan yang diberikan rakyat terhadap pemimpin negara. Terdapat sejarah panjang politik Thailand di mana terjadinya transisi antara monarki absolut hingga sampai membentuk monarki konstitusional yang masih dianut hingga sekarang (Anckar, 2020).

Monarki yang utuh pada umumnya disebut monarki konstitusional karena orang-orang terdahulu menganggap bahwasannya monarki absolut tidak dapat memenuhi syarat demokrasi. Oleh karena itu, tepat pada tahun 1932 menjadi posisi monarki terkuat di Thailand karena adanya transisi ketika terjadinya kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer dan sipil. Demikian hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, justru dengan adanya kudeta tersebut tidak memberikan demokrasi yang utuh kepada Thailand. Sampai pada tahun 1974, Thailand melalui ambang batas antara otokrasi dan demokrasi (Anckar, 2020).

Demokrasi yang dianggap sulit tercapai tentunya menjadi warna bagi politik Thailand sejak 1932. Tahun di mana Thailand resmi menjadi monarki konstitusional dan dominasi militer menjadi elemen terkuat dari kudeta yang terjadi sejak perubahan jenis pola pemerintahan. Proses parlementer yang berbelit-belit sangat berdampak atas struktur pembuatan kebijakan yang kurang tepat dan setelah itu orang Thailand menganggap bahwa dirinya telah demokratis serta mereka terlalu mengacu pada dukungan raja. Pada dasarnya Thailand telah menunjukan kemajuan akan demokrasi setelah terjadinya perubahan struktur monarki absolut ke monarki konstitusional sejak 1932. Selama itu juga militer mengkoordinir raja, bangsa dan agama. Selanjutnya baru setelah tahun 1973 Thailand dapat menggulingkan militer (Asian Perspective, 1996).

Sejatinya Thailand sebagai salah satu negara berkembang dalam pembaharuan akan demokrasi tidak bisa dihindarkan. Negara yang sama sekali tidak pernah dijajah rupanya dapat mengikuti perkembangan yang tidak terbatas. Banyak kondisi yang telah dilalui salah satunya mengenai perbandingan politik yang dibersamai dengan adanya tradisi budaya atau kepercayaan bagi orang Thailand. Karena orang Thailand berpikir bahwasannya tradisi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang dapat diterapkan dengan pola pemerintahan yang agung dan demokratis (Hartati, 2018).

Terdapat tiga pedoman suci yang disebut "*eka lak thai*" yang berarti, Bangsa Thai, Buddhism, dan raja. Tiga pedoman tersebut tidak dapat dipisahkan dan dianggap sebagai sebuah atribut sosial di Thailand. Oleh karena itu, pedoman legitimasi atau asas dari atribut sosial Thailand akan membatasi pola demokrasi. Demokrasi Thailand menjadi tidak mutlak dengan dianggap hanya formalitas

seremonial karena tidak ada batas kebebasan antara agama dan pola demokrasi. Dengan begitu keberadaan demokrasi Thailand yang sangat menjunjung tinggi keyakinan negara dan ruang identitas politik menjadi tidak otentik (Hartati, 2018).

Tidak hanya mengenai identitas budaya Thailand, kebijakan sistem politik yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan demokrasi di sebuah negara pun penting diatur sedemikian rupa agar tidak ada hal yang membatasi ruang kebebasan dan hak asasi manusia. Hukum kekuasaan yang berlaku tentunya berisi tentang pembatasan kekuasaan raja oleh konstitusi yang berlaku, tetapi tidak demikian hal tersebut justru berkebalikan dengan fakta yang terjadi bahwasannya sistem monarki sangat membatasi ruang demokrasi Thailand. Salah satu penerapan hukum yang bermasalah adalah hukum *lèse majesté* yang merupakan contoh bagaimana demokrasi Thailand tidak berjalan dengan baik. Dalam peraturan hukum tersebut berisi tentang perlindungan terhadap keluarga raja dari kritik dan akan menjerat orang-orang yang mengkritik dengan hukuman sampai 15 tahun penjara. Hal ini yang mencetus gerakan mahasiswa pro-demokrasi Thailand untuk menuntut adanya penghapusan hukum *lèse majesté* dan memperjuangkan haknya sebagai manusia (Ebbinghaus, 2013).

Pada dasarnya hukum *lèse majesté* tidak dimaksudkan untuk membatasi hak kebebasan berpendapat. Tetapi salah satu bagian dari KUHP Thailand ini tidak mencerminkan fakta bahwasannya raja sangat tidak mentolerir adanya kritik yang masuk. Seiring berjalannya waktu demokrasi terus bertambah, banyak tokoh organisasi yang independen aktif dalam menyuarakan dan mendorong lapisan masyarakat untuk bersuara dalam tuntutan perubahan politik. Protes dimulai pada awal tahun 2020 dengan demonstrasi menentang pemerintahan Perdana Menteri

Prayut Chan-o-cha. Kemudian tuntutan ini diperluas hingga mencakup tuntutan reformasi monarki Thailand yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama berbulan-bulan sebagian besar kaum muda turun ke jalan di Thailand untuk berdemonstrasi menentang pemerintah yang dipimpin militer. Protes ini ditujukan terhadap sistem ekonomi dan politik yang telah berlaku selama beberapa dekade. Gelombang protes pertama ini diadakan secara eksklusif di kampus akademis dan berhenti karena pandemi Covid-19. Protes dilanjutkan pada 18 Juli 2020 dengan demonstrasi besar yang diselenggarakan di bawah payung pemuda merdeka pada Monumen Demokrasi di Bangkok (Hinz, 2022).

Protes pada bulan Juli yang dipicu oleh dampak pandemi Covid-19 dan pemberlakuan keputusan darurat *lockdown* menyebar secara nasional membuat warga Thailand juga mempertanyakan pembatasan pertemuan publik yang dilakukan pemerintah selama pandemi. Para pengunjuk rasa sebagian besar adalah pelajar dan pemuda yang tidak memiliki pemimpin secara keseluruhan (Hinz, 2022). Meskipun ada seruan untuk reformasi demokrasi yang komprehensif, tidak banyak yang berubah dalam masyarakat Thailand sejak pecahnya protes pada tahun 2020. Sedikitnya ada 10.000 pengunjuk rasa yang sebagian didominasi oleh mahasiswa turun ke jalan untuk menyerukan reformasi monarki. Tidak hanya sehari, para pengunjuk rasa turun ke jalan selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan dengan meneriakkan “berhentilah melecehkan rakyat” (Ratcliffe, 2020).

Gerakan mahasiswa yang dipimpin oleh para aktivis ini ditemukan bahwa mereka terhubung baik dengan politik yang kompleks khususnya di Thailand. Dari segi ideologi aktivisme mahasiswa cenderung ke kiri, namun ada juga

mahasiswa yang berhaluan kanan karena melihat beberapa tindakan positif pada sistem pemerintahan. Sebenarnya, para mahasiswa tersebut telah diperiksa dalam hal ideologis mulai dari akar, organisasi internal, dan karakteristik kepemimpinan. Akan tetapi, faktanya pemikiran-pemikiran tersebut dapat berpengaruh dalam perubahan politik di suatu negara. Pada dasarnya, gerakan mahasiswa belum dijelaskan secara memadai dalam hal mereka secara khusus di mana mereka muncul dan berusaha untuk bertahan hidup karena di sisi lain terdapat bentuk perlawanan (Siwach Sripokangkul, 2019).

Seperti protes yang dipimpin oleh generasi baru yang berani menjadi aktivis untuk memimpin jalannya unjuk rasa. Tidak hanya melalui gerakan unjuk rasa di jalan, protes mahasiswa pro-demokrasi juga menggunakan sosial media dengan menggunakan tagar "*Republic of Thailand*" yang sudah digunakan lebih dari 820.000 cuitan. Tindakan yang tidak pernah terjadi sebelumnya menjadi sejarah bagi Thailand, pasalnya para partai ikut mendukung kuat protes para pemuda tersebut. Bahwa terdapat tiga tuntutan utama protes mahasiswa pro-demokrasi terhadap pemerintah yaitu, pembaharuan konstitusi, berakhirnya pelecehan terhadap aktivis oposisi, dan permohonan agar pemerintahan Prayut mundur (Matthew Tostevin, 2020).

Prayut terus mencari dialog untuk mencoba meredakan ketegangan di jalan. Sementara itu, pemerintah meminta Prayut untuk tidak menggunakan hukum *lèse majesté* atas tuntutan yang diberikan kepadanya. Para penentang Prayut kemudian berpendapat bahwa kekuasaan telah direbut sejak kudeta tahun 2014 dibawah aturan demi keuntungannya. Faktor-faktor lain muncul karena

diduga adanya tuduhan korupsi besar-besaran pada pemerintah elit Thailand tanpa adanya hukuman (Matthew Tostevin, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan, yakni: Bagaimanakah analisis faktor munculnya gerakan mahasiswa pro-demokrasi terhadap politik di Thailand tahun 2020-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan faktor pendorong terjadinya gerakan mahasiswa dalam upaya upaya gerakan mahasiswa pro-demokrasi terhadap politik di Thailand 2020-2021.
2. Mengetahui pengaruh mahasiswa dalam upaya gerakan mahasiswa pro-demokrasi terhadap politik di Thailand 2020-2021.
3. Mengetahui kondisi politik demokrasi di Thailand pada tahun 2020-2021.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana tantangan hukum dan hak asasi manusia telah membentuk gerakan tersebut dengan fokus pada periode 2020-2021. Dimana terdapatnya sebuah fase kritis yang ditandai dengan meningkatnya aktivisme politik dan tindakan keras pemerintah. Ruang lingkupnya mencakup analisis hambatan hukum yang dihadapi oleh aktivis mahasiswa, seperti penggunaan hukum *lèse-majesté*, dekrit darurat, dan instrumen hukum lainnya yang digunakan untuk menekan perbedaan pendapat. Penelitian ini akan

menggunakan teori gerakan sosial yang bersumber dari buku "*Social Movements: An Introduction*" (1999, edisi kedua 2006) yang ditulis oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani untuk memahami bagaimana represi hukum berdampak pada aksi kolektif dan perjuangan yang lebih luas untuk reformasi demokratis. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki strategi yang digunakan oleh para aktivis mahasiswa untuk menavigasi kendala-kendala hukum dan mengadvokasi perubahan demokratis.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya, sudah banyak kajian terkait aksi protes gerakan mahasiswa di Thailand. Setiap tema tentu mempunyai ciri khas tersendiri, baik dari segi faktor pendorong, upaya yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa pro-demokrasi, maupun pengaruhnya terhadap politik di Thailand. Penelitian ini akan fokus pada sejarah awal gerakan tersebut, khususnya sejak indikasi pelumatan terhadap demokrasi yang mulai membingkai politik Thailand sejak Prayut menjadi Perdana Menteri.

Dalam bagian latar belakang jurnal, Claudio Sopranzetti membahas kemunculan kudeta tahun 2006 yang membatasi ruang lingkup pemerintahan dengan konstitusi baru. Di sisi lain, peran monarki sangat dominan dalam membentuk tiga elemen utama: struktur administrasi yang dialihkan kepada militer, penguatan anti korupsi daripada demokrasi, dan peralihan aliansi dari tradisional. Sopranzetti juga menyatakan bahwa tindakan menyimpang yang dilakukan oleh Prayut memicu intervensi militer, gejolak politik, dan mobilisasi rakyat. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintahan Thailand yang diktator

didasarkan pada aliansi kelas sosial, serta konstitusi baru yang sulit memulihkan politik demokratis (Sopranzetti, 2016).

Sulitnya menciptakan ruang demokrasi di Thailand juga dibahas oleh Patrick Jory. Ia mencatat bahwa hukum *lèse majesté* menyebabkan penangkapan, pemenjaraan akademisi, dan dakwaan aktivis yang memperlihatkan perjuangan masyarakat terbuka menjadi lebih sulit. Namun, sebagian masyarakat tetap mengkritik melalui internet yang kemudian menimbulkan undang-undang kejahatan komputer. Undang-undang baru tersebut mencakup berbagai pelanggaran di internet, tetapi terutama digunakan untuk menindak kritik terhadap monarki. Penggulingan monarki absolut pada tahun 1932 tidak sepenuhnya menghilangkan kekuatan politik keluarga kerajaan yang melampaui batas-batas hukum *lèse majesté*. Kebebasan berpendapat dan kritik menjadi terbatas dalam menghambat pengembangan rasionalitas dalam sistem monarki yang masih dianut hingga sekarang (Jory, 2013).

Coorey dalam jurnalnya membahas bahwa pengaruh politik di Thailand tidak hanya berdasarkan sistem atau legitimasi hukum, tetapi juga aktor yang sangat berpengaruh terhadap jalannya hukum, termasuk raja. Menurut Coorey, supremasi hukum di Thailand sangat dipengaruhi oleh keputusan raja. Hukum tidak akan berkembang jika tidak didukung oleh raja. Perkembangan demokrasi di Thailand tidak hanya mengandalkan konstitusi gaya barat, tetapi juga mengadopsi model pemisahan kekuasaan. Meski Thailand secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokratis, perubahan dari monarki absolut ke monarki konstitusional menandai awal pemisahan antara konsep hukum dan kerajaan (Coorey, 2010).

Dengan demikian, memahami dinamika politik di Thailand menunjukkan keterkaitan antara gerakan dan kontramobilisasi. Penelitian ini akan membahas pengaruh dari berbagai sistem yang diterapkan terhadap munculnya aktor yang aktif dan mengganggu keberlangsungan aktor lain. Keamanan yang lebih terstruktur diperlukan karena banyak gerakan yang dilakukan oleh kelas-kelas aktor yang sering kali berlawanan satu sama lain. Monarki menjadi pusat gerakan yang memperburuk situasi dan memicu konflik yang terus-menerus. Penelitian ini juga fokus pada rezim pro-kontra mengenai monarki yang menunjukkan dinamika berlawanan dan polarisasi pemerintahan yang tidak membantu masyarakat. Sebagian kelompok sipil yang terorganisir mengejar tujuan politik dengan cara yang tidak adil, sementara tidak ada dukungan dari aktor manapun untuk mempertahankan struktur pemerintahan yang adil.

Penjelasan mengenai beberapa penelitian yang telah disebutkan tentu berbeda dari "Tantangan Hukum dan Aspirasi Demokratis: Perspektif atas Perjuangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Munculnya Gerakan Mahasiswa Pro-Demokrasi Thailand (2020-2021)" karena fokus utamanya adalah menekankan pada dinamika antara gerakan mahasiswa, intervensi militer, dan peran dominan monarki dalam politik Thailand yang menciptakan hambatan bagi demokrasi. Sementara itu, penelitian "Tantangan Hukum dan Aspirasi Demokratis" lebih fokus pada tantangan hukum dan hak asasi manusia dalam konteks gerakan mahasiswa pro-demokrasi pada periode 2020-2021. Penelitian ini juga memberikan analisis mendalam tentang bagaimana hukum *lèse majesté* dan propaganda media sosial yang digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat dan kritik terhadap monarki.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep kerangka pemikiran teori gerakan sosial. Teori gerakan sosial sendiri merupakan gerakan yang tidak hanya hadir sebagai aksi kolektif mahasiswa, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat membentuk tuntutan politik dan sosial di tingkat nasional. Untuk lebih mendalami definisi teori gerakan sosial, penelitian ini merujuk dari Buku "*Social Movements: An Introduction*" (1999, edisi kedua 2006) yang ditulis oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani. Di dalam buku tersebut telah berisi pemahaman mendalam mengenai sifat aksi kelompok dan transformasi masyarakat dari beberapa aspek. Oleh karena itu, Donatella Della Porta dan Mario Diani telah mengatur empat isu pertanyaan mengenai gerakan sosial, yaitu:

1. *CONFLICT: Is every social movement an expression of conflict?*

   Maksudnya adalah teori gerakan sosial mengakui bahwa gerakan sosial bukan peristiwa yang terisolasi, melainkan mewakili ketegangan, ketidakadilan, dan keluhan masyarakat yang lebih besar. Gerakan-gerakan ini dimulai ketika orang atau organisasi yang mengidentifikasi ketidakadilan, keluhan atau peluang, perubahan, dan ingin mengambil tindakan kolektif untuk mengatasinya. Idenya menyoroti bagaimana beberapa aspek berinteraksi untuk membentuk awal pertumbuhan dan konsekuensi dari gerakan sosial tersebut.

2. *CULTURAL ISSUES: How are social problems identified as potential objects of collective action?*

Maksudnya adalah hasil dari kesamaan identitas, keluhan, dan cita-cita gerakan sosial yang nantinya akan membantu anggotanya mengembangkan rasa kebersamaan. Identitas bersama ini bertindak sebagai perekat untuk menyatukan orang-orang dengan memiliki tujuan, solidaritas, dan rasa memiliki. Gerakan sosial yang dapat menginspirasi dan mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam tindakan kolektif, bahkan ketika menghadapi risiko atau biaya dengan membina identitas bersama.

3. *COLLECTIVE ACTION: How does it become possible to mobilize and face the risks and costs of protest activity?*

Maksudnya adalah ide aksi kolektif merupakan inti teori gerakan sosial dalam upaya mengkoordinasikan orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dikenal sebagai gerakan sosial. Berbagai bentuk aksi kolektif dapat dilakukan mulai dari aksi unjuk rasa tanpa kekerasan hingga strategi yang lebih disruptif termasuk boikot, pemogokan, dan aksi pembangkangan sipil. Para anggota akan bersama-sama bergerak untuk menyuarakan pendapat mereka dalam menghadapi situasi yang ada dan memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan terhadap permasalahan mereka.

4. *SUCCESS: What does explain the varying intensity over time of collective violence and other types of public challenges against power holders?*

Maksudnya adalah Untuk melanjutkan upaya mereka dan mencapai tujuan gerakan sosial membutuhkan pendanaan. Aset ini dapat

berupa uang, sumber daya manusia, material, liputan media, pengetahuan hukum, dan infrastruktur organisasi. Untuk mencapai tujuan gerakan dan mengatasi tantangan mobilisasi sumber daya yang efektif memerlukan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan sumber daya dengan cara yang diperhitungkan (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

Pada dasarnya, gerakan sosial juga secara signifikan dibentuk oleh sistem peluang politik. di sisi lain, upaya pergerakan mungkin terhambat oleh keterbatasan dalam struktur peluang politik. Gerakan sosial rata-rata memanfaatkan peluang untuk mengatasi hambatan dengan memodifikasi rencana dan taktik untuk dapat merespon adanya perubahan struktur politik. Gerakan yang menggunakan metode untuk menumbangkan otoritas dalam memberikan tekanan dan meneruskan tujuan mereka. Berbagai macam strategi tercakup dalam rangkaian perselisihan termasuk demonstrasi, protes, pendudukan, aksi duduk, pemogokan, dan tindakan pembangkangan sipil.

Hal yang disebutkan adalah sebuah metode strategis yang digunakan gerakan untuk memaksimalkan dampak dan memanfaatkan peluang serta menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi. Analisis terhadap strategi ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas gerakan dalam mobilisasi, dukungan menarik perhatian publik, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Keterlibatan mahasiswa dalam aksi politik tersebut juga menciptakan jaringan dan solidaritas dengan kelompok atau individu lain yang mendukung perubahan demokratis di Thailand.

Dengan demikian, pentingnya konteks politik Thailand (2020-2021) dalam teori gerakan sosial dapat digaris bawahi bagaimana faktor-faktor politik, konflik, dan budaya mempengaruhi munculnya gerakan mahasiswa pro-demokrasi. Penelitian ini dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana dinamika ini berinteraksi dan memberikan gambaran menyeluruh tentang pengaruh gerakan mahasiswa terhadap politik di Thailand selama periode penelitian. Kesinambungan teori gerakan sosial dengan penelitian dapat memberikan landasan teoritis yang kokoh untuk menjelaskan dan menganalisis dampak gerakan mahasiswa pro-demokrasi terhadap politik di Thailand pada tahun 2020-2021. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa di Thailand banyak menjadikan perubahan dramatis dalam masyarakat di seluruh dunia. di mana terdapat gerakan sosial dengan ideologi yang mampu mengadakan demonstrasi massa atau merubah sistem politik (Marisa Elena Olsen 2023).

1.7 Argumen Sementara

Dari kerangka pemikiran diatas bisa disimpulkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa di Thailand merupakan bentuk nyata bagaimana konsep teori gerakan sosial terpenuhi dengan sangat jelas. Mulai dilihat dari banyaknya perubahan pada gerakan mahasiswa kepada negara secara komplit. Diperkuat dengan masalah utama sistem monarki konstitusional yang tidak dapat diterima dengan lapang oleh gerakan masyarakat sipil tersebut. Penelitian juga menggambarkan bahwa gerakan mahasiswa pro-demokrasi di Thailand sesuai dengan elemen-elemen kunci teori gerakan sosial dengan mengidentifikasi identitas kolektif mahasiswa termasuk tujuan dan nilai bersama menjadi dasar mobilisasi massa yang efektif. Temuan ini mendukung argumen bahwa identitas

kolektif berperan penting dalam menggerakkan perubahan sosial dan politik. Dengan demikian, keterlibatan para mahasiswa yang lebih banyak dari pada negara untuk memaksa menegakkan demokrasi terlihat bagaimana konsep teori gerakan sosial itu hadir dan berpengaruh terhadap analisis penelitian ini.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menganalisis suatu persepsi dari pemikiran seseorang secara individu maupun kelompok. Melalui beberapa deskripsi yang kemudian digunakan dengan tujuan untuk menemukan penjelasan yang akan mengarahkan pada kesimpulan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah negara sebagai aktor utama yakni Thailand, selain itu terdapat aktor yang berseteru yakni gerakan mahasiswa Pro-demokrasi. Akan tetapi, karena memfokuskan kepada pengaruh gerakan mahasiswa di Thailand yang Pro-demokrasi maka subjek penelitian ini akan difokuskan kepada mahasiswa.

Sedangkan objek penelitian ini adalah rumusan masalah pada penelitian yaitu faktor-faktor dan pengaruh munculnya gerakan mahasiswa di Thailand.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data didefinisikan sebagai proses di mana semua sumber informasi yang relevan dikumpulkan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Maka sumber yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data sekunder. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian terkait pengaruh gerakan mahasiswa terhadap upaya menegakkan demokrasi di Thailand (2020-2021) dilakukan dengan metode studi literatur. Melalui metode tersebut pengumpulan data-data dalam penelitian ini melalui internet, sumber artikel, buletin daring, dan buku-buku yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan metode lanjutan yang akan dilakukan untuk menganalisis data yang telah didapatkan. Setelah mendapatkan berbagai literatur maka akan dibagi berdasarkan pada beberapa sub-bab yang kemudian akan dijabarkan secara deskriptif dari hasil pembagian sub-bab terkait. Langkah yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan penelitian yang didapat dari hasil interpretasi pemikiran kajian penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian akan dibagi dalam beberapa bab untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan. Dalam pembahasan berfokus kepada permasalahan yang dituju serta menunjukkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis. Dan pembagian bab sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I. Latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Pembahasan dan Analisis, pada bab ini diuraikan isi serta menganalisis mengenai fenomena dari adanya faktor yang mengidentifikasi sebuah konflik bisa mempengaruhi isu-isu sosial budaya dalam gerakan mahasiswa pro-demokrasi terhadap politik di Thailand 2020-2021.

BAB III. Hasil dan Implementasi, pada bab ini diuraikan hasil agar dapat mengimplementasikan analisis faktor munculnya gerakan mahasiswa pro-demokrasi terhadap politik di Thailand 2020-2021.

BAB IV. Kesimpulan, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penyusunan penulisan tugas akhir.

BAB 2

DINAMIKA KONFLIK DAN IDENTITAS KULTURAL DALAM GERAKAN MAHASISWA PRO-DEMOKRASI DI THAILAND

2.1. Gerakan Sosial sebagai Ekspresi Konflik

Memahami konsep konflik dalam teori gerakan sosial pada dasarnya Donatella Della Porta dan Mario Diani mengkritik hal tersebut sebagai sebuah fenomena yang sebagian besar bersifat konjungtif atau sebuah fenomena muncul akibat dari suatu hal yang telah teridentifikasi. Pada halaman dua puluh satu di dalam bukunya telah tertulis bahwa kegagalan sistemik dalam memenuhi harapan kelas pekerja dari negara-negara berkembang akan memicu gelombang baru dan konflik kelas yang berkelanjutan. Hal tersebut juga akan mencerminkan feminisasi angkatan kerja yang semakin meningkat dan dimensi etnis yang semakin kuat mengikuti dinamika migrasi massal. Kalimat tersebut mencerminkan adanya sebuah aksi kolektif yang bersifat konflik. Aktor-aktor gerakan sosial terlibat dalam konflik politik dan budaya yang dimaksudkan untuk mendorong atau menentang perubahan sosial (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

Konflik yang dimaksud adalah hubungan yang berlawanan antara para aktor yang berusaha untuk menguasai kepentingan yang sama. Baik itu kekuasaan politik, ekonomi, budaya, dan dalam prosesnya saling mengajukan tuntutan negatif. Tuntutan yang jika direalisasikan juga akan merusak kepentingan aktor lainnya. Oleh karena itu, mengatasi masalah kolektif harus terdapat adanya

memproduksi barang publik atau menyatakan dukungan terhadap nilai-nilai seperti, prinsip-prinsip moral yang tidak secara otomatis sejalan dengan aksi gerakan sosial dan membutuhkan identifikasi target-target upaya kolektif yang secara khusus diartikulasikan dalam istilah-istilah sosial atau politik. Sebaliknya, ketika aksi kolektif hanya berfokus pada perilaku dan keabsahan individu-individu tertentu atau menyalahkan masalah-masalah yang terjadi pada umat manusia secara keseluruhan seperti bencana alam atau kehendak ilahi, maka akan sulit untuk berbicara tentang proses gerakan sosial (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

Masuk ke dalam fenomena kasus, bahwasannya konflik ini muncul karena fenomena tersebut adalah awal mula Prayut Chan-o-cha terpilih menjadi Perdana Menteri tahun 2014. Sebagai seorang royalis dan penentang mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, Prayut digambarkan setelah diangkat menjadi panglima militer pada tahun 2010 akan selalu dianggap sebagai pembela doktrin militer yang gigih. Prayut juga merupakan tokoh kunci dalam penindasan militer terhadap protes kaos merah pada tahun 2009-2010 (thehindu 2010). Dalam upaya untuk menaikkan citranya, Prayut kemudian berbicara dengan keluarga para pengunjuk rasa yang tewas dalam bentrokan sengit dan bekerja dengan pemerintahan Yingluck Shinawatra yang memenangkan pemilihan parlemen pada Juli 2011 (Prachatai 2011).

Tidak lama kemudian protes besar-besaran terjadi di Bangkok oleh kelompok yang menentang pemerintah Yingluck. Para demonstran bahkan berupaya dalam menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang pemerintahanya juga ditentang oleh kelompok royalis Bangkok karena dianggap

korupsi dan terlalu terkait dengan kelompok bisnis keluarga Shinawatra (News Wires 2014). Lantas pemerintah Thailand langsung mendirikan Pusat Resolusi Situasi Darurat atau *Centre for the Resolution of the Emergency Situation* (CRES), yaitu sebuah badan khusus pemerintah dengan mengangkat Prayut sebagai anggota eksekutif selama kerusuhan politik tahun 2010 (England 2010).

Prayut mengawasi CRES dari 5 Oktober 2010 hingga 21 Desember 2010, di mana Prayut menggunakan teknik otoriter untuk mempertahankan kontrol politik. Dengan teknik tersebut, CRES justru tidak bertahan lama. Setelah pembubaran CRES, Prayut bergabung dengan oposisi melawan Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh Yingluck Shinawatra pada pemilihan umum Thailand 2011. Meskipun Prayut memberitahu media bahwa ia berada di tengah-tengah, Prayut memohon kepada masyarakat Thailand untuk tidak mendukung Pheu Thai karena Prayut yakin hal itu akan mengakibatkan "kekacauan dan kekerasan". Partai Pheu Thai akhirnya menang telak dan untuk mendesak militer agar tidak terlibat dalam politik (Prachatai 2011).

Pada dasarnya Prayut berupaya untuk menengahi penyelesaian antara Suthep Thaugsuban dan Yingluck Shinawatra. Meski memegang kendali atas sejumlah kekuasaan penting, Prayut berargumen bahwa mereka tidak mencoba melakukan kudeta. Namun, upaya penyelesaian tersebut tidak mencapai hasil kesepakatan dan Prayut resmi mendeklarasikan untuk tetap melakukan kudeta untuk mengambil alih kendali segala administrasi nasional (Davidson and Weaver 2014).

Sejarah politik di Thailand akhirnya terulang kembali, tentara kerajaan Thailand mengumumkan darurat militer nasional pada tanggal 20 Mei 2014. Dua hari kemudian, tepat pada 22 Mei 2014 militer di bawah kepemimpinan Jenderal Prayut Chan-o-cha melakukan kudeta militer untuk menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra dan resmi menjabat sebagai Perdana Menteri. Setelah enam bulan aksi timbulah kembali protes jalanan terkait ketidakstabilan politik, kekerasan di jalanan, dan ketegangan yang meningkat antara kelompok pro kontra pemerintah. Jenderal Prayut Chan-o-cha mengumumkan pemulihan hukum dan ketertiban saat memulai kudeta ke-13 yang berhasil sejak tahun 1932. Prayut bersumpah untuk mengubah sistem politik yang bengkok sesuai dengan konstitusi (Pavin Chachavalpongpun 2014).

Setelah kudetanya, Prayut membentuk Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban atau *National Council for Peace and Order* (NCPO) hal tersebut untuk menangguhkan konstitusi dan membubarkan pemerintah untuk mengambil alih negara. Di bawah arahannya NCPO memberlakukan darurat militer di Thailand dengan pengambilalihan Kekuasaan oleh Jenderal Prayut Chan-o-cha yang menyatakan dirinya sebagai kepala Dewan Administrasi untuk mereformasi NCPO dan terkendali penuh atas pemerintahan. Sebagai presiden junta Prayut melakukan sejumlah reformasi dan inisiatif. Seperti membuat konstitusi baru, menerapkan kebijakan untuk memerangi korupsi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi lain kelompok hak asasi manusia dari negara-negara demokratis mengkritik karena pemerintahan yang membatasi kebebasan sipil, perbedaan pendapat politik serta kebebasan berbicara (News Wires, 2014).

Dalam rancangan pencalonan tersebut, bukan hal yang mengejutkan bagi National Legislative Assembly (NLA) yang memilih Prayut lantaran sebagian besar dianggap tidak lebih dari sekedar parlemen yang bertugas melakukan reformasi, tetapi juga di bawah pengawasan tentara. Prayut yang sudah berusia 60 tahun akan pensiun sebagai panglima militer pada bulan September 2014 tetapi akan tetap menjabat sebagai kepala junta yang secara resmi dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO). Setelah mengkonsolidasikan kekuasaan, Jenderal Prayut resmi diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Raja Bhumibol Adulyadej pada 25 Agustus 2014. Dengan terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand pemerintahan Prayut diwarnai oleh otoritarianisme melalui penindasan terhadap protes dan pembatasan kebebasan sipil (News Wires, 2014).

Kampanye perubahan ideologi dan represi politik yang dilakukan oleh junta Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) patut mendapat perhatian khusus karena hal ini menandai penyimpangan dari praktik-praktik yang menyertai kudeta Thailand. NCPO juga menggunakan taktik intimidasi dan undang-undang yang keras untuk membungkam para pengkritik. Terbukti bahwa mereka telah mengganti Pasal 44 yang memberikan wewenang kepada Perdana Menteri ketua NCPO untuk mengeluarkan perintah eksekutif apa pun yang dianggap penting untuk menjaga perdamaian (Chris Baker 2016).

Dinyatakan bahwa program "reformasi" tersebut akan mencakup 11 bidang dan membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya karena banyaknya undang-undang yang diperlukan sebagai mesin untuk membangun kembali sistem politik negara yang sedang berjalan. Untuk

menerapkan program perubahan yang komprehensif junta NCPO menerapkan kontrol yang ketat, menekan semua kritik, dan perbedaan pendapat serta melarang perdebatan apapun. Alhasil kudeta tahun 2014 masuk dalam daftar kudeta penting dalam sejarah Thailand (Chris Baker 2016).

Setelah menggulingkan Perdana Menteri terpilih Yingluck Shinawatra, Prayut merancang sebuah konstitusi baru untuk membebaskannya dari tanggung jawab atas kudeta dan memungkinkan ia untuk tetap menjadi pejabat militer sambil menjadi kepala negara. di sisi lain, Prayut menjanjikan perdamaian bagi rakyat Thailand dan junta segera mulai menindak segala bentuk perbedaan pendapat, penindasan tanpa henti terhadap kebebasan, dan hak-hak dasar sambil mengambil alih kekuasaan yang lebih besar, serta membuat ancaman untuk mengembalikan demokrasi dalam waktu satu tahun (Eldridge and Pletcher 2024).

Pada dasarnya, Prayut telah menuntut rakyat Thailand untuk puas dengan segala cara sejak pengambilalihan kekuasaan. Mayoritas pemimpin oposisi menerapkan sistem pendekatan menunggu dan melihat keadaan politik kedepan. Namun, semakin banyak warga Thailand yang merasa kesal dan mengambil tindakan negatif mereka jika militer semakin lama menolak mengembalikan demokrasi. Faktanya, laporan menunjukkan bahwa tim Thaksin telah berbicara dengan beberapa penentangnya mengenai potensi kolaborasi kedepan. Negara yang dulunya merupakan negara monarki absolut, tetapi justru beraliansi dengan militer. Kemudian Prayut mengeluarkan konstitusi sementara yang dapat memberikan dirinya kekuasaan dan amnesti bagi dirinya sendiri karena telah melakukan kudeta (Doug Bandow 2014).

Tepat pada 23 Juni 2014 terlihat bahwa Wissanu Krea-ngam seorang pengajar hukum di Universitas Chulalongkorn sedang menulis konstitusi sementara dengan didampingi Jenderal Prayut dan Pornpet Wichitchonlachai yang merupakan dosen hukum Universitas Chulalongkorn yang di sisi lain juga menjabat sebagai penasihat ketua NCPO. Dengan demikian, konstitusi tersebut juga disahkan langsung oleh Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO). Dua bulan setelah kudeta Prayut membawa rancangan konstitusi tersebut kepada raja dan pada hari yang sama pada tanggal 22 Juli 2014, Raja Bhumibol Adulyadej menandatangani konstitusi tanpa meminta masukan publik yang pada akhirnya konstitusi tahun 2007 digantikan oleh konstitusi baru (Matichon 2014).

Konstitusi baru tersebut memberikan amnesti kepada mereka yang terlibat dalam semua tindakan militer di masa lalu dan di masa depan terkait kudeta yang memberikan NCPO kekuasaan yang luas. Kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk pemimpin NCPO dalam mengeluarkan perintah apapun sesuka hati demi keamanan atau reformasi. Terlepas dari kenyataan bahwa Prayut pada dasarnya tidak mengakui bahwa Thailand sebagai negara demokratis dan rakyat Thailand sebagai negara yang berdaulat. Semua perintah tersebut dianggap final dan NCPO melarang wacana publik mengenai konstitusi sementara (Prachatai 2024).

Tidak hanya itu, didalamnya terdapat salah satu bentuk konstitusi yang paling kontroversial adalah terbukti pada Pasal 44 konstitusi yang dibuat sementara untuk menggantikan Undang-Undang Darurat Militer tahun 1914 dan konstitusi tersebut resmi diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2015. Dalam statusnya sebagai ketua NCPO Prayut juga diberikan wewenang tidak terbatas di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, konstitusi sementara membebaskan

siapapun dari tanggung jawab apa pun yang bertindak atas nama NCPO (Human Rights Watch 2016). Dengan demikian, proses-proses ini telah melemahkan prakondisi struktural yang telah memfasilitasi munculnya perpecahan kelas terutama dalam kebijakan yang telah dikukuhkan Prayuth saat terjadinya kudeta. Secara keseluruhan kaum sosial yang tidak memiliki akses penuh terhadap kewarganegaraan dan hak-haknya telah diabaikan, baik karena mereka adalah sebuah masyarakat kecil atau para pemuda mahasiswa (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

2.2 Isu-Isu Budaya dalam Gerakan Sosial

Selanjutnya adalah fenomena yang nantinya akan memproses gerakan sosial dari banyaknya identifikasi sebuah ketidakadilan dan sistem nilai yang kontras antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Pada dasarnya, hal ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Perubahan dalam struktur sosial dan tatanan normatif ditafsirkan dalam proses evolusi budaya yang melaluinya ide-ide baru muncul di benak individu. Ketika norma-norma tradisional tidak lagi berhasil menyediakan struktur yang memuaskan untuk perilaku, individu dipaksa untuk menantang tatanan sosial melalui berbagai bentuk ketidaksesuaian. Hal tersebutlah yang telah ditegaskan dalam buku "*Social Movements: An Introduction*" (1999, edisi kedua 2006) yang ditulis oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani yang mana sebuah gerakan sosial akan berkembang ketika perasaan ketidakpuasan menyebar dan lembaga-lembaga yang tidak cukup fleksibel tidak dapat merespon (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

Sosiologi gerakan sosial berutang banyak wawasannya kepada para siswa dari mazhab perilaku kolektif. Untuk pertama kalinya, gerakan kolektif didefinisikan sebagai tindakan yang bermakna dalam mendorong perubahan sosial yang sering kali diperlukan dan bermanfaat. Telah dicantumkan pada halaman tiga belas bahwasannya perilaku kolektif telah menekankan pada proses produksi simbolik dan konstruksi identitas yang keduanya merupakan komponen penting dari perilaku kolektif. Dan hal tersebut akan menunjukkan bagaimana gerakan-gerakan mengembangkan ide-ide dan nilai-nilai baru bekerja sebagai agen-agen perubahan budaya dengan komunitas kritis yang nantinya akan menjadi masalah akut dalam menarik perhatian media yang menjadi wilayah gerakan sosial dan politik (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

Sesuai apa yang telah dijelaskan dalam konsep teori gerakan sosial dalam buku Donatella Della Porta dan Mario Diani dapat diimplementasikan dalam fenomena setelah Prayut berhasil merubah sistem pemerintahan. Dimulai saat Prayut mencoba untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap orang-orang yang mengolok-olok berbagai kejahatannya di Facebook, bahkan Kewaspadaan pemerintah terlihat jelas dalam penangkapan seorang anak berusia 14 tahun pada bulan Mei atas tuduhan *lèse majesté* terhadap dugaan kejahatan yang sering dilontarkan terhadap para pendukung demokrasi. Dengan demikian, bisa terlihat dengan jelas cermin kepemimpinan dari Prayut yang tidak menepati janjinya untuk memulihkan demokrasi (Doug Bandow 2017).

Sebagai darurat militer yang terjadi, pasal 44 konstitusi sementera tersebut justru mempunyai kewenangan untuk menahan seseorang secara diam-diam tanpa tuduhan atau pengadilan serta menginterogasi mereka tanpa memberikan mereka

perwakilan hukum atau perlindungan dari kekerasan. NCPO belum memberikan bukti apa pun untuk menyangkal tuduhan berat terhadap mereka, namun dengan tegas menolak klaim bahwa militer telah menganiaya dan menyiksa para tahanan (Human Rights Watch 2016).

Selama masa pemerintahan NCPO juga membuat larangan pertemuan politik lebih dari lima orang. Pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul tersebut sebagai pertanda munculnya sistem pemerintahan yang kontroversial. Setidaknya 27 orang, termasuk 14 aktivis dari gerakan demokrasi baru di Bangkok yang ditahan pada bulan Juni 2015 telah didakwa melakukan penghasutan karena menentang otoritas militer dan menentang larangan junta mengenai pertemuan publik. Tidak hanya itu, pelanggaran terus terjadi dengan adanya junta secara agresif memberlakukan pasal 44 konstitusi sementara. Salah satunya adalah hukum *lèse majesté* sebagai kepentingan NCPO (Human Rights Watch 2016).

Alih-alih menepati janjinya kepada masyarakat sipil, Prayut bahkan menciptakan pemerintahan yang otoriter. Masyarakat masih menunggu janji Prayut untuk memberikan suara mengenai masa depan mereka. Banyak pihak yang khawatir bahwa ketika Prayut memimpin akan terus membawa jauh pada sistem demokrasi. Banyak yang berpendapat bahwa kudeta Prayut dimaksudkan untuk menjaga elit Thailand tetap berkuasa pada kerajaan. Prayut yang secara terang-terangan memblokade akses dan membatasi ruang demokrasi karena terbukti Prayut mendukung RUU *lèse majesté* pada tahun 2015. Prayut juga mengatakan bahwa protes lawan-lawannya terhadap otoritasnya menjadi alasan di balik penahanan para aktivis (khaosodenglish 2015).

Tiba saat *Human Rights Watch* menulis surat kepada pemerintah Thailand pada tanggal 24 November dan mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai kondisi di pangkalan militer yang dikenal sebagai 11 tahun Army Circle. Surat tersebut dikirim sebagai tanggapan atas meninggalnya Suriyan Sucharit Polwong yang merupakan seorang peramal dan Prakrom Warunprapa seorang mayor polisi saat keduanya dituduh melakukan tindakan hukum *lèse majesté*. *Human Rights Watch* juga akan mengecam junta karena tidak melaksanakan janjinya dalam menghormati hak asasi manusia dan memulihkan pemerintahan demokrasi. Dalam sebuah referendum yang ditandai dengan metode represif yang digunakan terhadap penentang konstitusi juga memperkuat penggunaan kekuatan militer yang tidak terkendali dan kejam, tetapi pemerintah tetap melakukan sensor, kebijakan penahanan sewenang-wenang, dan kurangnya akuntabilitas (Doug Bandow 2017).

Tidak terlepas dari dinamika gerakan sosial maupun gerakan konsensus para aktor berbagi solidaritas, uraian panjang mengenai isu-isu budaya dalam gerakan sosial khususnya pada fenomena perjuangan hukum dan hak asasi manusia dalam munculnya gerakan mahasiswa pro-demokrasi thailand (2020-2021) yang selanjutnya akan menjadi rangkaian aksi kolektif dan memiliki unsur konflik. Gerakan yang berfokus pada pemberian bantuan atau pertolongan pada kolektivitas yang dirugikan menyiratkan bahwa para analis mengakui adanya beberapa mekanisme atau dinamika sosial dalam setiap contoh aksi kolektif yang akan memfokuskan upaya mereka untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme tersebut beroperasi dan berinteraksi satu sama lain (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

BAB 3

ANALISIS EMPIRIS GERAKAN MAHASISWA PRO-DEMOKRASI DI THAILAND

3.1 Latar Belakang Gerakan Mahasiswa Pro-Demokrasi di Thailand sebagai *Collective Action*

Berikutnya adalah fenomena yang nantinya akan memproses gerakan sosial dari banyaknya identifikasi sebuah ketidakadilan yang mana akan memunculkan para aktor baik individu maupun kelompok terorganisir dengan tetap menjaga otonomi dan kemandiriannya dalam pertukaran sumber daya yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi inisiatif-inisiatif spesifik, pengaturan perilaku aktor-aktor individual, dan pendefinisian strategi semuanya akan bergantung pada negosiasi permanen antara individu-individu dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam aksi kolektif. Oleh karena itu, lebih banyak kesempatan muncul bagi individu-individu yang memiliki komitmen tinggi atau terampil untuk memainkan peran independen dalam proses politik dibandingkan ketika aksi terkonsentrasi di dalam organisasi-organisasi formal (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

Penjelasan tersebut telah diuraikan dalam buku "*Social Movements: An Introduction*" (1999, edisi kedua 2006) yang ditulis oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani pada halaman dua puluh satu. Penjelasan tersebut kemudian ditegaskan bahwa identitas kolektif dalam teori gerakan sosial tidak hanya merupakan kumpulan dari acara-acara protes atas isu-isu tertentu atau bahkan

kampanye-kampanye tertentu. Sebaliknya, sebuah proses gerakan sosial hanya terjadi ketika identitas kolektif berkembang yang mana hal tersebut akan melampaui peristiwa dan inisiatif tertentu. Identitas kolektif sangat terkait dengan pengakuan dan penciptaan keterhubungan. Identitas kolektif membawa rasa dengan memiliki tujuan yang sama dan komitmen bersama terhadap suatu tujuan yang memungkinkan para aktivis atau organisasi untuk melihat diri mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari para pelaku lainnya. Tidak harus identik, tetapi pasti kompatibel dalam mobilisasi aksi kolektif yang lebih luas (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

Pembangunan identitas kolektif juga mengharuskan para aktor untuk membangun hubungan antara berbagai kejadian baik yang bersifat privasi maupun publik yang berada pada titik-titik ruang dan waktu yang berbeda serta relevan dengan pengalaman mereka. Dengan demikian, sebagai hasilnya para aktor organisasi dan individu yang terlibat dalam aksi kolektif tidak lagi hanya mengejar tujuan-tujuan tertentu, tetapi menganggap diri mereka sebagai bagian dari proses perubahan yang jauh lebih besar dan mencakup banyak hal atau perlawanan terhadap perubahan. Sebagai fenomena yang terjadi dalam kasus gerakan mahasiswa pro-demokrasi thailand (2020-2021). Para partisipan dalam peristiwa-peristiwa terhubung dalam skala yang sama yaitu sebagai “mahasiswa” dan perlawanan terhadap identifikasi ketidakadilan terhadap pemerintah Thailand khususnya masa jabatan Perdana Menteri Prayut dapat dihubungkan bersama dalam gerakan yang sama melalui proses-proses pembangunan identitas yang didasarkan pada jaringan organisasi dan komunikasi supranasional (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

Hal tersebut juga yang dapat menjelaskan bagaimana saat protes dimulai awal tahun 2020 dikarenakan terdapat besarnya tuntutan untuk menentang pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang kemudian berkembang menjadi tuntutan untuk mereformasi monarki Thailand. Penyebab awal terjadinya demonstrasi adalah pembubaran organisasi Partai Maju Masa Depan atau *Future Forward Party* (FFP) (Ratcliffe 2020). Partai yang memiliki kebijakan untuk mencakup desentralisasi birokrasi, meningkatkan kesetaraan sosial, dan membatasi pengaruh militer dalam politik Thailand. Partai tersebut juga berjanji untuk menghapuskan wajib militer sebagai upaya untuk menarik pemilih muda yang diperkirakan akan menjadi kekuatan politik yang kuat pada pemilu yang akan datang (thaipbsworld 2018).

Pada dasarnya partai ini menjadi kekuatan besar pada kalangan kaum progresif dan pemilih muda karena programnya. Namun, partai tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dugaan memperoleh pinjaman gelap sehingga membuat geram masyarakat dan menimbulkan tuntutan prasangka hukum. Banyak yang memandang pembubaran ini sebagai upaya pemerintah untuk meredam oposisi politik dan sebagai pukulan terhadap demokrasi Thailand yang sudah lemah. Tindakan tersebut pun memicu kembali gelombang baru demonstrasi gerakan mahasiswa pro-demokrasi yang ditandai dengan semangat muda, kekuatan, strategi yang terus meningkat meskipun ada tindakan keras, pelecehan, dan penangkapan oleh pemerintah (Gunia 2020).

Selepas pembubaran partai FFP, faktor bangkitnya para demonstran juga dikarenakan berlakunya sistem konstitusi baru yang diterapkan sudah tidak lagi wajar. Salah satunya adalah sistem yang menyangkut undang-undang pemilu

ditulis dengan cara yang ambigu seperti pemberian kursi yang terlalu banyak pada pemilu menyebabkan media mempublikasikan hasil pemilu yang terpisah dan berdasarkan pembacaan undang-undang yang berbeda. Sampai pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum memutuskan sebelum pemungutan suara bahwa setiap kursi dalam daftar partai yang diberikan harus mencerminkan lebih dari 70.000 suara. Menyusul kritik keras terhadap Komisi Pemilihan Umum karena merahasiakan teknik penghitungannya dan Pada 11 April 2019 KPU memutuskan untuk merujuk kasus ini ke Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Pemilu tidak melanggar konstitusi dan menolak permohonan tersebut (Pravit Rojanaphruk 2019).

Faktor lain juga menciptakan munculnya Persatuan untuk Demokrasi Melawan Kediktatoran atau *United Front of Thammasat and Demonstration Front* (UFTD) yang merupakan organisasi aktivis mahasiswa berskala besar memainkan peran penting dalam merencanakan demonstrasi besar-besaran menentang pemerintah dan monarki. Mereka memasang manifesto yang menyerukan agar monarki bertanggung jawab untuk mengurangi anggaran kerajaan, menjamin bahwa monarki menjunjung cita-cita, dan tidak melakukan campur tangan politik. UFTD juga menuntut dilakukannya perubahan terhadap konstitusi dengan memastikan aktivitas raja terbuka dan bertanggung jawab. Organisasi tersebut menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dengan alasan keterlibatannya dalam pengambilalihan militer pada tahun 2014, ketidakmampuan pemerintahannya untuk menangani masalah sosial, dan ekonomi bangsa. Untuk lebih melayani kepentingan rakyat Thailand dan menjamin perlindungan hak asasi

manusia, UFTD juga menuntut agar konstitusi baru segera ditetapkan (ISEAS Perspective 2022).

Tepat pada tanggal 10 Agustus 2020 permintaan tersebut mengejutkan pemerintahan Thailand dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Meskipun menghadapi penindasan yang keras dan tindakan hukum dari pemerintah, UFTD tetap berkomitmen terhadap tuntutan reformasi dan terus mengorganisir protes demonstrasi di seluruh Thailand. Demonstrasi tersebut menyatukan berbagai kelompok yang pada akhirnya berkembang menjadi gerakan nasional. Protes yang dianggap bersifat organik atau tidak memiliki pemimpin ini mampu mobilisasi media sosial masyarakat yang kemudian sejumlah aktivis mahasiswa dijuluki sebagai "pemimpin mahasiswa" ketika kampanye tersebut mendapatkan perhatian sebagian besar karena pernyataan publik dan interaksi media mereka yang provokatif (Iseas Perspective 2022).

Gerakan mahasiswa Thailand pada periode 2020-2021 muncul sebagai manifestasi dinamika kompleks dalam tipologi gerakan mahasiswa. Gelombang protes pertama pada awal 2020 di Thailand telah menjadi sorotan utama seiring dengan berbagai peristiwa yang memicunya. Konteks politik yang kompleks ini menjadi katalis bagi mahasiswa Thailand untuk bersatu dalam gerakan protes yang mengusung berbagai tuntutan, melibatkan pengalaman, tantangan, dan memperhitungkan pengaruh kecerdasan emosional sebagai faktor utama (Peck 2019).

Pada hakikatnya, para demonstran tidak bisa bungkan akan hal yang terjadi pada Thailand pada saat itu. Banyaknya kebijakan yang memang

kontroversial menjadikan masalah nasional terus bertambah. Seperti maraknya kedapatan korupsi setelah kudeta tahun 2014 berlangsung dan lembaga-lembaga korupsi lainnya juga mengalami penurunan keterbukaan khususnya dalam sistem peradilan masyarakat sipil. Di mana pemerintahan militer menerapkan pembatasan ketat terhadap media dan sangat menekan kritik terhadap rezim saat itu (ganintegrity 2020).

Protes mahasiswa di Thailand tidak hanya terfokus pada masalah politik langsung, tetapi juga mencakup perubahan dalam sistem pendidikan. Protes pada periode 2020-2021 juga mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, peristiwa-peristiwa tragis seperti penghilangan paksa aktivis politik, khususnya yang berada di pengasingan menjadi pemicu untuk melawan ketidakadilan dan menciptakan perubahan. Pandemi Covid-19 yang tampaknya tidak menghalangi siapapun untuk melakukan demonstrasi guna menuntut perbaikan. Para demonstrasi yang mengkritisi pemerintahan otoriter dan tidak demokratis selama pandemi juga tampaknya memberikan dorongan bagi sebagian masyarakat Thailand untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara (Prachatai 2020).

Demonstrasi dianggap sebagai salah satu cara demokrasi untuk menurunkan Perdana Menteri Prayut dan mengurangi kekuasaan raja. Hal ini dianggap sebagai upaya rakyat yang diwakili oleh kaum muda untuk membawa perubahan di Thailand agar menjadi lebih baik dan demokratis, baik dalam hal sistem pemerintahan maupun kekuasaan monarki (Ekvittayavechnukul 2021). Secara keseluruhan, gerakan demonstrasi mahasiswa pro-demokrasi di Thailand menandai periode signifikan dalam sejarah perjuangan demokrasi di negara

tersebut. Melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama kaum muda gerakan ini mencerminkan tuntutan akan perubahan substansial dalam sistem politik di Thailand. Meskipun menghadapi tantangan dan respon keras dari pemerintah, semangat demokrasi yang diusung oleh gerakan ini menunjukkan ketahanan dan keberlanjutan perjuangan menuju pemerintahan yang lebih transparan serta responsif terhadap keinginan rakyat (Reed,2021).

Pada dasarnya, sasaran utama gerakan mahasiswa pro-demokrasi di Thailand adalah mencoba untuk menyerukan reformasi terhadap sistem politik Thailand, termasuk amandemen konstitusi, dan perubahan proses pemilu agar lebih demokratis. Gerakan yang bertujuan untuk pemberdayaan pemuda dan memberi mereka peran yang lebih besar dalam membentuk masa depan negara. Para aktivis berupaya menantang status quo dan mendorong penuh dalam tindakan politik. Para pengunjuk rasa menyerukan kebebasan berekspresi yang lebih besar karena mereka menghadapi tantangan dan pembatasan dalam mengekspresikan pendapat mereka terutama mengenai masalah politik. Gerakan ini juga berupaya mengakhiri dugaan intimidasi dan pelecehan pemerintah terhadap para aktivis. Tentu ada kekhawatiran mengenai penggunaan langkah-langkah hukum untuk menekan perbedaan pendapat dan menyatakan ketidakpuasan terhadap pemerintah, akan tetapi para aktivis tetap menyerukan menyerukan dan tidak kenal lelah dalam menghadapi pemerintahan (Barron and Wong 2020).

Selain itu, peran media sosial menggambarkan dan memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik. Informasi dan narasi yang dibagikan melalui *platform* daring tidak hanya mempengaruhi opini publik di dalam negeri,

tetapi juga mendapatkan perhatian dan dukungan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa di Thailand tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga menjadi bagian dari narasi global tentang perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia (Wasserstrom 2020).

Terdapatnya simbol salam tiga jari ini masih terus berkembang sampai tahun 2020. Sampai pada akhirnya terdapat deklarasi pertanggungjawaban terhadap kerajaan dan lembaga-lembaga terpilih dalam tuntutan monarki. Selanjutnya tuntutan tersebut menjadi tuntutan utama yang berisi: (1) membubarkan parlemen dan menjadwalkan pemilu baru, (2) menulis ulang konstitusi, dan (3) reformasi konstitusi kerajaan. Aksi tersebut merupakan respon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Thailand yang memutuskan bahwa Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha sebagai Perdana Menteri seharusnya dihitung sejak tahun 2017 ketika konstitusi baru disahkan dan diumumkan secara resmi (McCargo, D 2020).

Kebangkitan aktivis mahasiswa merupakan sebuah mesin demokrasi dan kekuatan oposisi pemerintah terakhir setelah kudeta. Mereka yang menolak secara terang-terangan pemerintahan militer ketika mengkaji bagaimana tuntutan gerakan ini membahayakan kelompok penguasa dan penting untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan ini serta kerentanan para demonstran remaja. Mengingat hal ini menjadi sangat penting karena adanya kontrol ketat NCPO terhadap media sejak tahun 2014 telah membungkam suara oposisi dan kritik terhadap partai yang berkuasa. Oleh karena itu, setelah kudeta tahun 2014 para demonstran mahasiswa memprioritaskan pembubaran parlemen yang

merupakan tujuan pertama mereka serta menjadikannya pusat kegiatan anti-pemerintah mereka (McCargo, D 2020).

Perjalanan gerakan mahasiswa di Thailand selama periode 2020-2021 tidak hanya menghadapi keberhasilan dan dukungan semata. Tantangan dan respon dari pemerintah menjadi kenyataan di mana tindakan keras, penangkapan aktivis, dan pembatasan kebebasan berpendapat menghantui perjalanan mereka. Resistensi pemerintah ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa telah mencapai pencapaian signifikan dalam merumuskan perubahan sosial dan politik, mereka juga harus mengatasi konsekuensi yang mungkin memiliki dampak jangka panjang (Kanokrat Lerchusakul 2023).

Dalam menghadapi tantangan ini gerakan mahasiswa terus beradaptasi dan berkembang. Kemampuan mereka untuk berinovasi dalam taktik dan strategi menjadi kunci untuk menjaga momentum gerakan. Meskipun menghadapi penindasan, mahasiswa tetap teguh dan mencoba mencari celah untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Kreativitas mereka terlihat dalam berbagai cara, mulai dari penggunaan media sosial hingga demonstrasi dan aksi-aksi simbolis (Kanokrat Lerchusakul 2023). Demikian juga yang telah dicantumkan dalam buku "*Social Movements: An Introduction*" (1999, edisi kedua 2006) yang ditulis oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani halaman empat puluh tiga yaitu, tindakan negara yang mampu menghasilkan aktor-aktor kolektif secara luas dan pertumbuhan kelompok-kelompok sosial tertentu akan mengikuti arus prioritas kebijakan publik dan khususnya pada tujuan pengeluaran publik (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

3.2 Tantangan dan Peluang dalam Mobilisasi Sumber Daya

Kemudian yang terakhir adalah pendekatan proses politik, yaitu bahwa perubahan sosial yang cepat yang disebabkan oleh proses urbanisasi atau krisis ekonomi berskala besar dan sebagainya yang dapat menghasilkan tindakan kolektif. Namun, sebenarnya berfokus pada kekerasan kolektif dan perilaku mengganggu. Proses politik juga telah menuai kritik karena kecenderungan mereka untuk mengadopsi semacam "reduksionisme politik". Akibatnya, para pendukung tindakan tersebut hanya memberikan sedikit perhatian pada fakta bahwa banyak gerakan kontemporer (kaum muda, perempuan, homoseksual, atau kelompok etnis minoritas) telah dipengaruhi setidaknya oleh konteks budaya mereka seperti halnya konteks politik (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

Dalam mobilisasi sumber daya, pendekatan rasionalis terhadap adanya sebuah aksi kolektif cenderung mengabaikan asal-usul struktural protes. Yang mana hal tersebut ditegaskan dalam buku "*Social Movements: An Introduction*" (1999, edisi kedua 2006) yang ditulis oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani halaman sembilan belas bahwa terdapat dua sumber utama peluang bagi gerakan negara bangsa dan partai politik. Sumber yang pertama adalah perhatian terfokus pada peran yang dimainkan oleh gerakan-gerakan yang tidak hanya di dalam sistem politik, tetapi juga di dalam ruang publik. Dan sumber yang kedua merupakan peluang-peluang diskursif yaitu adanya wacana publik yang dominan mengenai isu-isu kontroversial tertentu yang kemungkinan besar akan mempengaruhi peluang keberhasilan gerakan (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

Sesuai apa yang telah dijelaskan dalam proses politik yang ditulis oleh Della Porta dan Mario Diani. Hal ini menekankan adanya interaksi antara gerakan sosial dan pemerintah. Dengan demikian, pembahasan akan fokus pada bagaimana aktor pemerintah bereaksi terhadap persoalan yang ditimbulkan oleh gerakan tersebut. Terdapat adanya struktur politik yang mengacu pada bentuk dari kesenjangan kekuasaan yang berkepanjangan antara militer dan monarki telah menentukan struktur peluang politik di Thailand. Salah satunya adalah taktik represif yang telah lama digunakan oleh pemerintah Thailand yang tentunya saat dipimpin oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Cara yang dipakai tidak jauh dari adanya penegakkan undang-undang ketat yang dimaksudkan untuk membungkam kritik dan menghukum para pembangkang seperti pasal 44 dan *lèse majesté.* Dengan demikian, negara dapat menekan para pengunjuk rasa dan menentang suara-suara melalui penangkapan, penahanan, dan penganiayaan hukum karena negara mengontrol lembaga peradilan serta penegakan hukum (Christensen 2020).

Dalam upaya meredam kritik dan mempertahankan status quo, pemerintah Thailand menggunakan sebagian besar tindakan melalui represi. Berbagai mekanisme yang ditemukan dalam teori gerakan sosial dapat membantu menjelaskan respon ini. Pertama, untuk mengakhiri demonstrasi dan meredam kritik, pemerintah menggunakan tindakan koersif. Hal ini mencakup penangkapan tindakan hukum yang ditujukan kepada penyelenggara dan peserta protes, serta penggunaan polisi anti huru hara, meriam air, dan gas air mata untuk membubarkan pertemuan. Menurut Layanan Medis Darurat Bangkok sedikitnya terdapat 55 orang mengalami cedera disebabkan oleh menghirup gas air mata.

Enam pengunjuk rasa demokrasi termasuk di antara yang terluka dan ditembak setelah terjadi bentrokan dengan pasukan ultra royalis pro-pemerintah yang dekat dengan lokasi demonstrasi (Human Rights Watch 2020).

Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober pemerintah melarang pertemuan lima orang atau lebih dan memberlakukan keadaan darurat parah di Bangkok mulai pukul 16.00 waktu setempat. Polisi anti huru-hara dipanggil untuk mengusir para demonstran. Tiga penyelenggara protes ditahan oleh polisi selama prosedur dan pemberitaan media yang sensitif dilarang. Melalui sensor dan misinformasi pemerintah berupaya melemahkan legitimasi gerakan mahasiswa pro-demokrasi dari banyaknya tuntutan para demonstran terhadap reformasi demokrasi telah dibingkai oleh media yang dikendalikan negara. Sebagai tindakan yang tidak stabil ini menggambarkan mereka sebagai pembuat onar atau bahkan berisiko terhadap keamanan nasional. Selain itu, pemerintah telah menerapkan langkah-langkah sensor yang ketat, seperti pelarangan situs web dan pengesahan undang-undang yang membatasi hak atas kebebasan berpendapat (aljazeera 2020).

Pemerintah Thailand juga menggunakan propaganda dan kendali atas media-media besar untuk mempengaruhi opini publik dalam melemahkan tujuan gerakan mahasiswa. Saluran media yang dikelola pemerintah mungkin meremehkan atau mengabaikan seruan para pengunjuk rasa untuk melakukan reformasi demokrasi dan menggambarkan mereka sebagai pembuat onar atau berisiko terhadap keamanan nasional. Tujuan dari manipulasi media ini adalah untuk mendiskreditkan perjuangan, membungkam kritik, dan mengikis dukungan publik (aljazeera 2020).

Padahal, untuk merekrut pengikut dan mempertahankan momentum gerakan sosial yang efektif memerlukan akses terhadap *platform* media, infrastruktur organisasi, dan dukungan finansial. Namun, aktivis mahasiswa merasa kesulitan untuk menggunakan sumber daya ini karena pemerintah Thailand membatasi hak untuk bebas berserikat dan berkumpul. Selain itu, pembatasan tindakan online, seperti sensor dan pengawasan, mempersulit mereka dalam merencanakan dan menyampaikan pesan dengan sukses. Selain itu, pemerintah juga berupaya memecah belah atau mengkooptasi gerakan tersebut dengan meminggirkan kelompok yang lebih radikal dan memberikan sedikit kelonggaran atau mengadakan diskusi dengan kelompok tertentu. Pemerintah ingin melemahkan kohesi dan kemanjuran gerakan tersebut dengan bersikap terbuka terhadap diskusi sekaligus menekan kritik (aljazeera 2020).

Pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan perintah apa pun untuk mengganggu atau menekan terlepas dari kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudisial dari perintah tersebut. Dengan demikian, kebijakan tersebut memberikan kekuasaan yang mutlak bagi pemerintah untuk terus mengesampingkan peraturan UU. Prayut pun beraksi bebas dalam menjalankan perintah apapun atas nama negara. Dilihat dari bagaimana pendapat para jurnalis, penulis, pelajar, pengacara, politisi, dan warga negara biasa semuanya dianggap sebagai musuh potensial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa alat represi utama pemerintah bersifat aktif dan ekspansif penggunaan hukum untuk membungkam para pengkritiknya (Thailand Law Library, n.d.-a).

Di sisi lain, gerakan mahasiswa pro-demokrasi di Thailand juga menghadapi tantangan besar. Respon keras dari pemerintah termasuk

penangkapan aktivis dan pembatasan kebebasan berpendapat dapat menciptakan lingkungan yang sulit bagi perjuangan demokrasi. Respon ini menciptakan suasana yang kurang kondusif bagi perjuangan demokrasi dan meningkatkan risiko bagi para aktivis yang bersikeras menyuarakan tuntutan mereka. Seiring berjalannya waktu, gerakan ini telah mengalami kemunduran, tetapi perubahan yang telah dipicu oleh pergerakan ini tetap terasa dalam politik dan masyarakat Thailand (Wichuta Teeratanabodee 2023).

Melihat bahwa tidak ada pengaruh yang besar dalam segala tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap gerakan mahasiswa, dalam konteks teori gerakan sosial membantu memahami bagaimana individu yang pada dasarnya adalah sebuah mahasiswa dapat bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Gerakan mahasiswa Thailand tidak hanya sebatas aksi protes, melainkan sebuah upaya kolektif untuk merumuskan perubahan politik yang signifikan. Tuntutan untuk mengubah kebijakan politik dan menciptakan mekanisme checks and balances pada monarki mencerminkan keinginan untuk mencapai demokrasi yang lebih substansial (Peck 2019).

Dalam dinamika gerakan ini, penting untuk memahami bahwa mahasiswa bukan hanya aktor pasif. Mereka bukan hanya melawan ketidakadilan yang ada, tetapi juga mencoba untuk merancang visi alternatif bagi masa depan politik dan pendidikan Thailand. Peran mahasiswa dalam mengajukan tuntutan, merumuskan agenda reformasi, dan mengorganisir demonstrasi menyoroti kemampuan mereka sebagai agen perubahan yang aktif dan kreatif. Selain itu, keberhasilan gerakan mahasiswa juga terletak pada kemampuannya untuk membawa isu-isu sensitif, seperti peran monarki dalam diskusi publik. Penggunaan media sosial dan

kebebasan berekspresi menjadi alat yang sangat efektif dalam memperluas cakupan dampak gerakan ini. Mahasiswa Thailand berhasil mengangkat isu-isu yang sebelumnya tabu, seperti hukum *lèse majesté* yang melarang kritik terhadap monarki menjadi bagian integral dari pembicaraan masyarakat (Peck 2019).

Perlu dicatat bahwa dampak pandemi Covid-19 juga memainkan peran dalam menggerakkan gerakan mahasiswa. Pembatasan yang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus menciptakan kondisi yang memungkinkan para mahasiswa untuk menggalang dukungan melalui *platform* daring. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kendala fisik, perubahan teknologi, dan konektivitas dapat memperkuat gerakan sosial. Gerakan mahasiswa juga mencerminkan adanya kekhawatiran terhadap hak asasi manusia di Thailand. Penghilangan paksa aktivis politik dan meningkatnya kasus penyiksaan menjadi pemicu utama dalam memobilisasi mahasiswa untuk menentang rezim yang dianggap melanggar hak-hak fundamental individu (Prachatai 2024).

Sejalan dengan perkembangan global, gerakan mahasiswa di Thailand tidak hanya menuntut perubahan dalam sistem politik dan pendidikan, tetapi juga mengeksplorasi dimensi-dimensi lain dari ketidaksetaraan sosial. Gerakan ini mencerminkan pergeseran paradigma yang lebih besar dari perjuangan melawan ketidakadilan politik menuju perjuangan untuk hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perubahan sosial yang menyeluruh. Bagian integral dari gerakan ini adalah peran perempuan yang tidak hanya berpartisipasi sebagai anggota, tetapi juga memimpin dan membentuk agenda gerakan. Keterlibatan aktif perempuan dalam gerakan ini menggambarkan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender

serta meruntuhkan stereotip yang ada di dalam masyarakat dan dalam sistem pendidikan (Lertchoosakul, 2021).

Berbagai teknik dan pendekatan yang digunakan oleh gerakan sosial untuk mempertanyakan status quo dan meneruskan tujuannya disebut sebagai panggung perselisihan. Seperti gerakan mahasiswa di Thailand yang para demonstran menggunakan beragam strategi inovatif seperti, non-kekerasan untuk menghalangi ketertiban sosial, menggalang perhatian media, dan memberikan tekanan kepada pemerintah. Protes besar-besaran, aksi duduk, dan pengambilalihan wilayah publik bertindak sebagai pusat aksi terkoordinasi yang mengungkap keluhan dan tuntutan gerakan tersebut. Untuk menghindari pengawasan polisi dan menjaga unsur kejutan, para demonstran melakukan gerakan *flash mob* dan protes gerilya hal ini digunakan sementara demi keamanan gerakan. Selanjutnya, simbolis seperti seni jalanan, seni pertunjukan, dan tarian viral berfungsi untuk menyebarkan pesan dan menumbuhkan empati (aljazeera 2020).

Selain itu, gerakan ini telah membawa perubahan dalam wacana politik dan sosial di Thailand. Pemuda yang aktif terlibat dalam gerakan mahasiswa pro-demokrasi membantu membentuk narasi baru tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi warga dalam proses politik. Mereka membawa isu-isu ini ke ruang publik dengan cara yang kreatif dan inovatif seperti menggunakan seni musik sebagai alat budaya populer sebagai untuk menyampaikan pesan mereka. Dengan demikian, hal tersebut menciptakan dampak jangka panjang dalam membentuk kesadaran masyarakat dan menginspirasi generasi muda untuk lebih aktif secara politik (prachatai english 2014).

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap keberhasilan gerakan mahasiswa pro-demokrasi di Thailand perlu mempertimbangkan dampaknya di tingkat lokal dan global. Meskipun belum terjadi perubahan signifikan dalam struktur politik secara langsung, gerakan ini telah berhasil menciptakan perubahan dalam pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kritis. Keberlanjutan semangat demokrasi dan keterlibatan aktif kaum muda dalam politik menandakan bahwa perubahan jangka panjang masih mungkin terjadi (Panu Wongcha-Um 2020).

Titik balik dalam sejarah politik Thailand adalah bangkitnya gerakan mahasiswa pada tahun 2020–2021 yang ditandai dengan semakin banyaknya generasi muda yang menentang status quo dan terlibat dalam aktivisme. Pengalaman, tantangan, dan pengaruh kecerdasan emosional menjadi faktor kunci yang membentuk karakteristik gerakan ini. Melalui partisipasi dalam proyek mengajar di berbagai sekolah mahasiswa Thailand menghadapi pengalaman yang melibatkan tantangan penyesuaian terhadap sistem pendidikan yang beragam (Prachatai 2020).

Kerangka untuk memahami dinamika, kekuatan pendorong, dan dampak gerakan ini dapat diperoleh dengan mengkaji fenomena melalui lingkaran teori gerakan sosial dengan mengacu secara khusus pada penelitian inovatif Donatella della Porta dan Mario Diani yang mendefinisikan bahwa teori gerakan sosial sebagai upaya kelompok yang dimotivasi oleh keluhan dan keinginan untuk masyarakat yang lebih baik dengan tujuan melakukan perubahan sosial, politik, atau budaya. Gerakan-gerakan ini dibentuk oleh berbagai elemen, seperti peluang politik, mobilisasi sumber daya, dan identitas konflik politik yang sedang berubah di negara tersebut. Dengan melibatkan kaum muda, terutama pelajar dan

mahasiswa gerakan ini memunculkan tuntutan untuk perubahan politik dan reformasi monarki yang sebelumnya dianggap sebagai isu sensitif dan tabu (Donatella della Porta & Mario Diani 2006).

Peran mahasiswa dan pelajar dalam gerakan ini juga menjadi perhatian khusus. Mereka tidak hanya menjadi pendorong utama di balik protes, tetapi juga agen perubahan dalam menciptakan budaya politik yang lebih terbuka dan responsif. Pendidikan politik di kampus-kampus menjadi semakin penting dalam membentuk pandangan mahasiswa tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab kewarganegaraan (Kanokrat Lertchoosakul 2012). Gerakan mahasiswa pro-demokrasi di Thailand harus dipandang sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih demokratis dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Meskipun gerakan ini mungkin menghadapi rintangan dan kemunduran, akan tetapi semangat dan ketahanan para aktivis pro-demokrasi menciptakan pondasi untuk perubahan yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap keberhasilan gerakan ini harus mempertimbangkan dampaknya dalam membentuk pemikiran dan perilaku masyarakat serta menciptakan ruang untuk dialog lebih lanjut tentang demokrasi di Thailand (Steven M. Buechler 2016).

Terdapatnya istilah “identitas kolektif” yang digambarkan oleh Donatella della Porta dan Mario Diani, istilah tersebut menjelaskan bagaimana anggota suatu gerakan sosial merasa memiliki cita-cita, identitas, dan rasa memiliki yang sama yang mendorong kerja sama, solidaritas, dan aksi kelompok. Dalam kasus gerakan mahasiswa Thailand, para demonstran berkumpul untuk mendukung serangkaian keluhan, tuntutan, pembelaan kebebasan sipil, akuntabilitas, dan

perubahan demokratis (Kanokrat Lertchoosakul 2012). Pentingnya interaksi antar individu dalam gerakan ini terbukti melalui peran mahasiswa sebagai agen perubahan di berbagai sekolah. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai mediator budaya yang membantu mengatasi kesenjangan budaya antara mahasiswa dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa Thailand dapat dilihat sebagai upaya kolektif untuk menciptakan transformasi positif dalam konteks pendidikan (Aljazeera,2020).

Saat melihat dampak jangka panjang gerakan dapat dilihat bahwa mereka telah berhasil menciptakan jejak positif dalam sejarah pendidikan di Thailand. Mahasiswa yang terlibat dalam gerakan ini telah menjadi pionir perubahan, membuka pintu untuk lebih banyak mahasiswa, dan pemangku kepentingan terlibat dalam transformasi pendidikan. Gerakan ini menjadi cermin dari kekuatan kolaborasi, kecerdasan emosional, dan tekad untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat (Nomadic Educator 2022). Gerakan mahasiswa Thailand bukan hanya menciptakan perubahan dalam sistem pendidikan, tetapi juga menunjukkan potensi besar dari kolaborasi antarindividu yang dilandasi oleh kecerdasan emosional. Oleh karena itu, gerakan ini bukan hanya tentang merubah sistem pendidikan, tetapi juga tentang membentuk individu-individu yang mampu bertindak sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat (Nomadic Educator 2022).

Penting untuk diakui bahwa perubahan sosial dan politik memerlukan waktu. Meskipun kemajuan mungkin tampak lambat, gerakan mahasiswa pro-demokrasi di Thailand telah membuka jalan untuk pembicaraan lebih lanjut tentang reformasi politik dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Mereka

telah memicu diskusi tentang peran monarki, transparansi pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan politik. Gerakan ini juga menerima aktivisme digital sebagai instrumen taktis untuk perlawanan dan organisasi. Para aktor mampu mengkoordinasikan aksi-aksi yang tersebar untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan mengatasi pembatasan dengan menggunakan kampanye online seperti, demonstrasi virtual dan aktivisme dunia maya. Strategi pembangkangan digital dan hacktivisme juga digunakan untuk menantang kendali rezim atas saluran informasi, komunikasi dengan mengganggu situs web, dan *platform* internet pemerintah (Fuangarun Preededilok 2021).

Kebangkitan gerakan mahasiswa di Thailand pada tahun 2020–2021 adalah contoh kuat dari aksi dan perlawanan generasi muda terhadap ketidakadilan, kesenjangan, dan kediktatoran. Gerakan ini telah mengubah lanskap politik Thailand dengan memunculkan harapan akan masa depan yang lebih demokratis dan inklusif karena kapasitasnya dalam memanfaatkan peluang politik dapat mengatur sumber daya, menciptakan identitas kolektif, dan menggunakan berbagai macam konflik (Reed 2021).

Melalui penggunaan teori gerakan sosial, bisa dilihat bahwa terdapat dinamika yang rumit terjadi dalam gerakan mahasiswa Thailand untuk mengadvokasi demokrasi. Meskipun terdapat hambatan besar seperti penindasan, keterbatasan sumber daya, perselisihan internal, campur tangan pemerintah, dan informasi yang salah dari media, tetapi para aktivis mahasiswa tetap menentang pemerintahan otoriter dan mendorong transformasi politik. Kegigihan dan ketangguhan mereka menyoroti perjuangan berkelanjutan Thailand untuk keadilan sosial dan demokrasi (Thailand Law Library, n.d.-a) .

Selama berbulan-bulan menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi Thailand, banyak kekerasan yang terjadi karena protes mahasiswa pro-demokrasi yang tidak kunjung usai. Para pengunjuk rasa berjanji akan terus mengambil tindakan sampai tuntutan mereka terpenuhi. Sampai pada saat di mana terjadinya kemunduran pada kelompok protes demokrasi yang membuat penurunan aksi besar-besaran di jalan dan pada akhirnya gerakan ini mengalami kegagalan pada tahun 2022. Alasan utamanya adalah kegelisahan dan banyaknya penganiayaan yang diciptakan oleh pemerintah. Namun, segala tuntutan dari para demonstran anak muda ini telah mengubah persepsi dan kesadaran warga Thailand terhadap monarki dan militer. Oleh karena itu, keberanian tersebut menjadi sejarah panjang bagi mahasiswa dan anak muda Thailand (Thepgumpanat and Tostevin 2020).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Gerakan mahasiswa Thailand pada periode 2020-2021 menciptakan dampak positif yang mendalam dalam berbagai dimensi, khususnya dalam konteks pendidikan dan politik. Mahasiswa yang terlibat menunjukkan keberanian dan kesediaan untuk beradaptasi dengan tantangan budaya, bahasa, dan sistem pendidikan yang berbeda. Hal ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa bukan hanya sebagai penerima pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam merumuskan dan mewujudkan visi perubahan sosial dan politik. Melalui berbagai taktik dan strategi mereka mampu mengangkat isu-isu kritis, menuntut perubahan substansial, dan menciptakan ruang untuk dialog partisipasi yang lebih luas. Dengan kreativitas, solidaritas, dan tekad yang kuat gerakan mahasiswa Thailand terus menjadi kekuatan yang memberikan dampak signifikan dalam tatanan sosial dan politik negara mereka.

Dalam menjawab rumusan masalah, Penulis ini menggunakan perspektif teori gerakan sosial yang bersumber dari buku "*Social Movements: An Introduction*" (1999, edisi kedua 2006) yang ditulis oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani untuk mengeksplorasi konsep aksi sosial dan perannya dalam membentuk perubahan politik, sosial, dan demokrasi di Thailand. Teori ini berpendapat bahwa tindakan sosial bukan sekedar tindakan kolektif tetapi juga merupakan alat yang dapat mempengaruhi perubahan politik dan sosial. Kajian

tersebut berfokus pada beberapa aspek seperti awal mula munculnya gerakan sosial, potensi dampaknya, peran organisasi sosial dalam melaksanakan aksi sosial, pengaruh faktor sosial, politik, dan budaya terhadap aksi sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa konteks politik Thailand (2020-2021) memainkan peran penting dalam membentuk aksi sosial.

Pada Bab II, penulis menguraikan jawaban dari dua isu pertanyaan pertama yaitu, "*CONFLICT: Is every social movement an expression of conflict?"* dan *CULTURAL ISSUES: How are social problems identified as potential objects of collective action?*. Yang mana dari dua isu pertanyaan tersebut mencapai sebuah kesimpulan yaitu, fenomena yang mendasari atau faktor awal mula munculnya gerakan mahasiswa dalam merespon keadaan demokrasi di Thailand pada tahun 2020-2021. Dimulai dari Prayut Chan-o-cha terpilih menjadi Perdana Menteri tahun 2014 sampai pada proses perkembangan politik dalam sejak masa pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha serta gerakan mahasiswa pro-demokrasi yang tidak terbatas pada perubahan politik langsung, tetapi mempengaruhi dinamika sosial dan budaya.

Pada Bab III, penulis menguraikan jawaban dari dua isu pertanyaan terakhir yaitu, *"COLLECTIVE ACTION: How does it become possible to mobilize and face the risks and costs of protest activity?"* dan *"SUCCESS: What explains the varying intensity over time of collective violence and other types of public challenges against power holders?"*. Yang mana dari dua isu pertanyaan tersebut mencapai sebuah kesimpulan yaitu, kebangkitan gerakan mahasiswa pada tahun 2020-2021 yang ditandai dengan semakin banyaknya generasi muda yang menentang status quo dan keterlibatan dalam aktivisme. Pengalaman, tantangan,

dan pengaruh kecerdasan emosional membentuk karakteristik gerakan. Kerangka untuk memahami dinamika, kekuatan pendorong, dan dampak gerakan ini dapat diperoleh dengan mengkaji fenomena ini melalui prisma gerakan sosial.

Terdapatnya konsep "identitas kolektif" menurut Donatella della Porta dan Mario Diani menjelaskan bahwa identitas sosial individu merupakan sebuah identitas, jati diri, dan semangat bersama yang mendorong kerja sama solidaritas tindakan kolektif. Dalam kasus gerakan mahasiswa Thailand, gerakan mahasiswa dipandang sebagai interaksi yang intens antara individu dengan lingkungan sosialnya. Gerakan pelajar dipandang sebagai guru yang aktif beradaptasi dan bekerja sama dengan masyarakat setempat sehingga mempengaruhi perubahan positif dalam pengaruh sistem pendidikan. Gerakan mahasiswa telah berperan penting dalam membentuk perubahan positif dalam sistem pendidikan yang menunjukkan potensi kerjasama individu-kelompok. Gerakan mahasiswa juga berperan penting dalam membentuk paradigma pendidikan di Thailand serta mempromosikan pendekatan pendidikan yang lebih menyeluruh dan demokratis.

Meskipun fokus utama gerakan ini adalah pada aspek politik, mahasiswa juga turut terlibat dalam membawa perubahan di sektor pendidikan. Gerakan yang tidak hanya menciptakan perubahan pada tingkat individu dan sekolah, tetapi juga membentuk jejak yang signifikan dalam sistem pendidikan nasional. Mahasiswa bukan hanya menjadi pelaku perubahan, tetapi juga peneliti yang mencari solusi berkelanjutan. Gerakan ini memainkan peran penting dalam membuka wacana reformasi pendidikan di tingkat nasional.

4.2 Rekomendasi

Peran media sosial dalam memobilisasi. Hal ini dapat memperluas jangkauan gerakan mahasiswa pro-demokrasi di Thailand dengan menggunakan cara menganalisis bagaimana *platform* media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi, mengorganisir protes, dan mempengaruhi opini publik. Dilanjutkan dengan adanya penelitian mengenai tanggapan dan dukungan internasional terhadap gerakan mahasiswa pro-demokrasi di Thailand. Bisa mencakup respon dari organisasi internasional, negara-negara tetangga, dan komunitas global lainnya. Tidak hanya itu, penelitian ini bisa dilanjutkan dengan memberikan wawasan mengenai kekuatan transnasional yang mempengaruhi perubahan politik di Thailand serta pola aktivisme pemuda dan perjuangan demokrasi di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Anckar, Carsten. 2020. "Constitutional monarchies and semi-constitutional monarchies: a global historical study, 1800–2017." Contemporary Politics Volume 27, 2021 - Issue 1 25.

ASIAN PERSPECTIVE, Vol. 20, No. 2, Fall-Winter 1996, pp. 301-321. 1996. "THE TRANSITION TO DEMOCRACY." ASIAN PERSPECTIVE, Vol. 20, No. 2, Fall-Winter 1996, pp. 301-321 307-309.

Coorey, Pornsakol Panikabutara. 2010. "King's Influence on the Rule of Law in Thailand." UNSW Law Research Paper No. 2010-30 2-3.

David S. Meyer, Sidney G. Tarrow. 1998. The Social Movement Society: Contentious Politics for a New Century. USA: BY ROWMAN AND LITTLEFIELD PUBLISHERS.

Dewi, Nevy Rusmarina. 2022. "Peran Manusia dalam Mendukung Demokrasi di Thailand." JPW (Jurnal Politik Walisongo) 47.

Ebbighausen, Rodion. 2013. Monarki Thailand Halangi Demokrasi. 01 29. https://www.dw.com/id/monarki-thailand-halangi-demokrasi/a-16558400.

Hartati, Anna Yulia. 2018. "PERAN " EKA LAK THAI" DALAM DEMOKRASI DI THAILAND." 8.

Jory, Patrick. 2013. "Chapter Two Karl Popper and Thailand's Political Crisis: The Monarchy as the Problem for an "Open Society"." 9.

Matthew Tostevin, Panu Wongcha-um. 2020. protests, Explainer: Thailand's anti-government. 08 16. https://www.reuters.com/article/us-thailand-protests-reasons-explainer-idUSKCN25C0LQ.

Ratcliffe, Rebecca. 2020. Pro-democracy movement draws thousands in Bangkok. 08 16. https://www.theguardian.com/world/2020/aug/16/thousands-call-for-reforms-to-monarchy-in-bangkok-protests.

Sikkink, Margaret A. Keck dan Kathryn. 1999. "Transnational advocacy network in international and regional politics." ISSJ 159 217-220.

Sombatpoonsir, Janjira. 2023. "A lot of people still love and worship the monarchy': How polarizing frames trigger countermobilization in Thailand." journal of peace research.

SOPRANZETTI, CLAUDIO. 2016. "Thailand's Relapse: The Implications of the May 2014." The Journal of Asian Studies 300.

bbc.com. (2020, February 28). แฟลชม็อบนักเรียน-นักศึกษา ประกายไฟในกระทะ หรือเพลิงลามทุ่ง. BBC. Retrieved August 26, 2023, from https://www.bbc.com/thai/thailand-51640629

Cottrill, C. (2022, October 2). .Klip kerusuhan di Simpang Bangna pelemparan batu ke arah polisi yang mengejar perusuh. . - YouTube. Retrieved August 26, 2023, from https://d.dailynews.co.th/politics/801839/

Hinz, E. (2022, May 19). What happened to Thailand's protests? – DW – 05/19/2022. DW. Retrieved August 26, 2023, from https://www.dw.com/en/thailand-what-happened-to-mass-anti-government-protests/a-61861179

Quinley, C. (2022, May 19). 'Shattering the palace': Young women take up Thailand reform call. Al Jazeera. Retrieved August 26, 2023, from https://www.aljazeera.com/news/2022/5/19/shattering-the-palace-young-women-take-up-thailand-reform-call

Setboonsarng, C., Wong, J., & Elgood, G. (2020, February 23). Banned Thai opposition party says junta helped 1MDB cover-up. Reuters. Retrieved August 26, 2023, from https://www.reuters.com/article/us-thailand-politics/banned-thai-opposition-party-says-junta-helped-1mdb-cover-up-idUSKCN20H0AD

Siwach Sripokangkul. (2019, 01 15). UNDERSTANDING THE SOCIAL ENVIRONMENT DETERMINANTS OF STUDENT MOVEMENTS: A CONSIDERATION OF STUDENT ACTIVISM IN THAILAND AND THE THAI “SOCIAL CAGE”. Student Activism in Thailand, IJAPS, Vol. 15, No. 1, 59–96, 2019, 61. https://www.researchgate.net/profile/Charles-Crumpton-2/publication/320831012_Understanding_the_Organization_and_Impact_of_Student_Movements_A_Consideration_of_Student_Activism_in_Thailand/links/5f85b66f92851c14bcc3d26d/Understanding-the-Organization-and-I

Tostevin, M., & Birsel, R. (2020, October 14). Explainer: What's behind Thailand's protests? Reuters. Retrieved August 26, 2023, from https://www.reuters.com/article/us-thailand-protests-reasons-explainer-idUSKBN2700IX

Abbott, Maxwell. 2021. “How Are Thailand's Youth Protests Impacting Foreign Investment?” The Diplomat. https://thediplomat.com/2021/03/how-are-thailands-youth-protests-impacting-foreign-investment/.

aljazeera. 2020. “In Pictures: Thai students' 'Hunger Games' protests spread.” Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/gallery/2020/8/19/in-pictures-thai-students-hunger-games-protests-spread.

aljazeera. 2020. “Thailand bans mass gatherings under emergency decree | Protests News.” Al Jazeera.

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/15/thailand-imposes-emergency-amid-protests-leaders-detained.

aljazeera. 2020. “PM Prayut Chan-o-cha Chan-o-cha promises to use 'all laws' against Thai protesters.” Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2020/11/19/pm-Prayut Chan-o-cha Chan-o-cha-promises-to-use-all-laws-against-thai-protesters.

Barron, Laignee, and Isaac Wong. 2020. “What Is the Milk Tea Alliance? Behind the Democracy Movement | TIME.” Time. https://time.com/5904114/milk-tea-alliance/.

Chris Baker. 2016. “The 2014 Thai Coup and Some Roots of Authoritarianism.” Journal of Contemporary Asia, 46(3), 388–404., (03).

Christensen, Thomas J. 2020. “Thailand's national moment: Protests in a continuing battle over nationalism | Brookings.” Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/thailands-national-moment-protests-in-a-continuing-battle-over-nationalism/.

Davidson, Helen, and Matthew Weaver. 2014. “Thailand army declares martial law, denies coup.” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2014/may/20/thailand-army-declares-martial-law-denies-coup-live.

Donatella della Porta & Mario Diani. 2006. SOCIAL MOVEMENTS AN INTRODUCTION. second ed. Malden: BLACKWELL. https://classroom.google.com/c/NDc3NTU0Njg1OTkx/m/NDgyNTIzNTA5OTE5/details.

Doug Bandow. 2014. “Junta Militer Thailand Menghancurkan Demokrasi, Menikmati Kekuasaan: Para Jenderal Menunda Pemilu Sebelum Mencuranginya.” cato. https://www.cato.org/commentary/thailands-military-junta-destroys-democracy-enjoys-exercising-power-generals-postpone.

Doug Bandow. 2017. “Diktator Thailand yang Cengeng, Prayut Chan-o-cha Chan-o-cha Chan‑Ocha Menargetkan Kritikus dan Demokrasi.” cato. https://www.cato.org/commentary/thailands-whiny-dictator-Prayut Chan-o-cha Chan-o-cha-chan-ocha-targets-critics-democracy.

Ekvittayavechnukul, Chalida. 2021. “Thai pro-democracy activists march against government.” AP News. https://apnews.com/article/democracy-health-coronavirus-pandemic-3efe93bb137f5639f126ccad84399ede.

Eldridge, Alison, and Kenneth Pletcher. 2024. “Prayut Chan-o-cha Chan-o-cha Chan-ocha | Thai Prime Minister, Military Leader, & Politician.” Britannica. https://www.britannica.com/biography/Prayut Chan-o-cha Chan-o-cha-Chan-ocha.

England, Vaudine. 2010. “BBC News - Are cracks emerging in Thailand's military?” Home - BBC News. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8615910.stm.

Fuangarun Preededilok, Sawaros Thanaponsangsuth P. 2021. “Thailand’s 2020s Youth-led Anti-government Movement from the lens of High School Students.” IAC Education, (12).

ganintegrity. 2020. “Thailand country risk report — GAN Integrity.” GAN Integrity. https://www.ganintegrity.com/country-profiles/thailand/.

Gunia, Amy. 2020. “Thailand's Opposition Future Forward Party Disbanded | TIME.” Time. https://time.com/5788470/thailand-future-forward-party-disbanded/.

Human Rights Watch. 2016. “Thailand: Peristiwa tahun 2015.” reliefweb. https://reliefweb.int/report/thailand/thailand-events-2015.

Human Rights Watch. 2020. “Thailand: Police Violence Against Democracy Demonstrators.” Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2020/11/19/thailand-police-violence-against-democracy-demonstrators.

ISEAS Perspective. 2022. “2022/3 ““Reform, Not Abolition”: The “Thai Youth Movement” and Its Demands for Reform of the Monarchy” by Anusorn Unno.” ISEAS-Yusof Ishak Institute. https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2022-3-reform-not-abolition-the-thai-youth-movement-and-its-demands-for-reform-of-the-monarchy-by-anusorn-unno/.

Janjira Sombatpoonsiri. 2020. “'Masyarakat sipil otoriter': Bagaimana aktivisme anti - demokrasi membentuk otokrasi Thailand.” Journal of Civil Society, (10).

Kanokrat Lerchusakul. 2023. “อนาคตใหม่-ม็อบคนรุ่นใหม่-ปรากฏการณ์ก้าวไกล: พลังส่งต่อจาก 2562 ถึง 2566.” The 101 World. https://www.the101.world/social-movement-and-future-forward/.

Kanokrat Lertchoosakul. 2012. “The Rise of the Octobrists: Power and Conflict among Former Left Wing Student Activists in Contemporary Thai Politics.” A thesis submitted to the Department of Government, the London School of Economics and Political Science. https://etheses.lse.ac.uk/503/1/Kanokrat_The%20Rise%20of%20the%20Octobrists.pdf.

khaosodenglish. 2015. “KETUA JUNTA CERAMAH PEMUDA TENTANG MONARKI & DEMOKRASI ALA THAILAND (TRANSKRIP).” khaosodenglish. https://www.khaosodenglish.com/politics/2015/07/08/1436349932/.

Kunnawut Boonreak dan Nontarat Phaicharoen. 2020. “Thailand's 'Bad Students' Rise Up to Demand Democracy, Education Reform.” Benar News. https://www.benarnews.org/english/news/thai/th-students-highschool-protests-10132020175940.html.

Lee A. Smithey, L. R. Kurtz. 2018. “The Paradox Of Repr x Of Repression And Nonviolent Mo ession And Nonviolent Movements.” SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY FACULTY WORKS.

Marisa Elena Olsen. 2023. “Challenging Power: Youth Activism in the Thai Pro-Democracy Movement (2020-2022).” https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/11250/3089435/Olsen_flkm2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Martin Petty. 2010. “Q+A : Apakah “kaos merah” Thailand berkumpul kembali?” reuters.

MASAYUKI YUDA. 2020. “Thailand parliament discards most constitutional reform ideas.” asia.nikkei. https://asia.nikkei.com/Politics/Turbulent-Thailand/Thailand-parliament-discards-most-constitutional-reform-ideas.

Matichon. 2014. “Kenali "Pornphet Wichitchonchai" guru hukum NCPO. Calon ketua panitia perancang konstitusi.” Matichon. https://web.archive.org/web/20140724182050/http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1406095423.

McCargo, D. 2020. “Dilema pengganggu? Protes Generasi Z di Thailand tahun 2020.” Studi Asia Kritis , 53 (2), 175–191.

NEWS WIRES. 2014. “Thailand coup leader Prayut Chan-o-cha Chan-o-cha Chan-ocha voted prime minister.” france24. https://www.france24.com/en/20140821-thailand-Prayut Chan-o-cha Chan-o-cha-chan-ocha-coup-leader-prime-minister-parliament.

Nomadic Educator. 2022. “Keadaan Demokrasi di Thailand dan Dampaknya terhadap Pendidikan Generasi Muda.” Esai akademis tentang pendidikan dan demokrasi di Thailand.

Panu Wongcha-Um. 2020. “Thai school 'Hunger Games' salute protests spread.” Reuters. https://www.reuters.com/article/us-thailand-protests-idUSKCN25E1AT/.

Pavin Chachavalpongpun. 2014. "Good Coup" Gone Bad: Thailand's Political Developments since Thaksin's Downfall. Kyoto: Institute of Southeast Asian Studies.

Peck, Grant. 2019. “Final Election Results Leave Thailand Divided – The Diplomat.” The Diplomat. https://thediplomat.com/2019/05/final-election-results-leave-thailand-divided/.

Prachatai. 2010. “CRES melarang siapa pun menjual atau memiliki barang. "Buat divisi."” Prachatai. https://prachatai.com/journal/2010/11/31969.

Prachatai. 2010. “Penangkapan penjual sepatu bergambar Perdana Menteri - Polisi mengatakan mereka membawa produk tersebut untuk diuji guna melihat apakah produk tersebut melanggar CRES.” Prachatai. https://prachatai.com/journal/2010/11/31976.

Prachatai. 2020. “[Full statement] The demonstration at Thammasat proposes monarchy reform.” Prachatai English. https://prachataienglish.com/node/8709.

Prachatai. 2024. “Pihak militer meminta kerja sama Universitas Thammasat untuk melarang mahasiswanya mengadakan seminar tentang konstitusi.” Prachatai.

https://prachatai.com/journal/2014/08/54975?__cf_chl_tk=bkqrkdCMEh8iaLAlgES22zvEbIQRYfae7smcPHq2c00-1708591264-0.0-5949.

prachataienglish. 2014. “Education ministry to integrate junta's 12 Thai values into education curriculum.” Prachatai English. https://prachataienglish.com/node/4215.

Prachathai. 2011. “Prayut Chan-o-cha menegaskan pasti akan ada pemilu, menyatakan netral, namun meminta untuk tidak memilih siapa pun yang akan menimbulkan kekacauan dan kekerasan.” Prachathai. https://prachatai.com/journal/2011/03/33672.

Pravit Rojanaphruk. 2019. “KERAGUAN ALOKASI DAFTAR PARTAI DI KPU TUMBUH... อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : https://www.khaosodenglish.com/politics/2019/04/08/doubts-over-election-commissions-party-list-allocations-grow/.” khaosodenglish. https://www.khaosodenglish.com/politics/2019/04/08/doubts-over-election-commissions-party-list-allocations-grow/.

Ratcliffe, Rebecca. 2020. “Thai court dissolves opposition party Future Forward | Thailand.” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/feb/21/thai-court-dissolves-opposition-party-future-forward.

Reed, John. 2021. “Why 'Bad Students' give bad marks to Thailand's schools.” Financial Times. https://www.ft.com/content/f9c33f1e-ad07-4b10-9291-b1bce3331e94.

Sainsbury, Michael. 2020. “Rising protests and a sinking economy spell trouble in Thailand.” Lowy Institute. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/rising-protests-sinking-economy-spell-trouble-thailand.

Steven M. Buechler. 2016. “New Social Movement Theories.” The Sociological Quarterly, 36(3), 441–464., (12).

straitstimes. 2016. “Apa yang perlu Anda ketahui tentang Pasal 44 konstitusi sementara Thailand.” straitstimes. https://www.straitstimes.com/singapore/what-you-need-to-know-about-article-44-of-thailands-interim-constitution.

Suzanne Staggenborg. 2005. Encyclopedia of Social Theory. USA: SAGE Publications, Inc.

thaipbsworld. 2018. “Future Forward mengungkap kebijakan yang dirancang untuk mengubah Thailand.” thaipbsworld. https://www.thaipbsworld.com/future-forward-unveils-policies-designed-to-change-thailand/.

thehindu. 2010. “RajaThailand menunjuk tokoh garis keras sebagai panglima militer berikutnya.” thehindu.

Thepgumpanat, Panarat, and Matthew Tostevin. 2020. “Thai police seize plaque targeting monarchy, weigh charges.” Reuters. https://www.reuters.com/article/idUSKCN26C1O7/.

Thepgumpanat and Tostevin. 2020. “Aktivis Thailand Parit 'Penguin' Chiwarak dirawat di rumah sakit setelah mogok makan di penjara — hal yang memalukan bagi Thailand.” tastythailand.

Wasserstrom, Jeffrey. 2020. “Hong Kong's protest movement has made a difference for the world.” Nikkei Asia. https://asia.nikkei.com/Opinion/Hong-Kong-s-protest-movement-has-made-a-difference-for-the-world.

Wichuta Teeratanabodee. 2023. “Thailand’s 2020–2021 Pro-Democracy Protests: Diversity, Conflict, and Solidarity.” Journal of Contemporary Asia, 1–25., (09).